

# DINAMIKA POLITIK MUSLIM TIONGHOA (Studi Kasus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia/PITI Yogyakarta)

Gugun El Guyanie<sup>1</sup>

## Abstract

This reasearch attempts to reveals political movement of Muslim Tionghoa people (Islamic Chinese) at Yogyakarta. Today, there is a significant shifting of Muslim Tionghoa people. It can not be sparated from the latest problem commonly growing up at Indonesia. Actually, in many years ago, the Tionghoa people did political role at Indonesia, but untill now they often become a victime of ethnic violence. Moreover they are still discriminated politically. Their rights as citizen of Indonesia is not fulfilled. They are still distinguished with native people (pribumi), in Indonesia. Their political movement was still restricted so much, especially in Orde Baru era.

However, recently, exactly after Reformation movement in 1998 occured, Tionghoa people in Indonesia are actively participating in political sphere. They are now success to be member of House of Representative, minister and governor. It is also done by Muslim Tionghoa in Yogyakarta. Muslim Tionghoa at Yogyakarta is united in a organization namely, PITI. PITI is a Muslim Tionghoa people organization existing in Indonesia. This organization has some branches in several Indonesian areas, including Yogyakarta.

When early being established, PITI Yogyakarta moved in social and religious activities only. But today, PITI Yogyakarta is taking act in every areas including social, religion, culture, economy and politic. It is

---

<sup>1</sup> Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

invented that the shifting movement of Muslim Tionghoa at Yogyakarta politically is related with ethnic discrimination in Indonesia. They would like to eliminate the such discrimination to reach their rights totally as Indonesian citizen.

### A. Latar Belakang

Melacak dinamika politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta harus dimulai dari sejarah Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Sejarah Tionghoa di Indonesia memang tidak pernah lepas dari isu diskriminasi dan sentimen rasial. Politik pencitraan (*political image*) lahir sejak era penjajahan kolonial Hindia Belanda. Padahal sejarah Tionghoa di Indonesia adalah setua usia Republik Indonesia, bahkan lebih tua, setara dengan pergulatan etnis-etnis lokal yang menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Dalam catatan sejarah, terdapat beberapa tragedi anti Tionghoa, diantaranya; pembantaian di Batavia tahun 1740 yang dilakukan oleh pasukan VOC yang menewaskan lebih dari 10.000 orang Tionghoa serta ratusan rumah dibakar; pembantaian pada masa Perang Jawa pada tahun 1825-1930-; peristiwa di Kudus pada tahun 1918 antara pemuda Tionghoa dengan oknum anggota Sarekat Islam (SI); pembunuhan di Jawa pada tahun 1946-1948-, tragedi rasialis 10 Mei 1963 dan 5 Agustus 1973; Peristiwa Malari 1974, penjarahan terhadap rumah dan toko orang Tionghoa tanggal 22-3- November 1980; dan kerusuhan Mei 1998 menjelang reformasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai tragedy pembantaian dan anti China dari masa ke masa serta jumlah korban dari orang Tongghoa dapat di baca dalam Benny G Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (Elkasa: Jakarta, 2002), hlm. 119.

Daniel S Lev memberikan catatan yang menarik, bahwa dimanamana etnis minoritas selalu menjadi sasaran kesalahan dan selalu menjadi kambing hitam dalam segala persoalan, bahkan dianggap sebagai sumber segala keburukan.<sup>3</sup> Padahal peran Tionghoa dalam kemerdekaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Misalnya kisah Djiaw Kie Siong yang dengan rela hati dan besar hati meminjamkan rumahnya untuk rapat persiapan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dalam struktur keanggotaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terdapat lima tokoh Tionghoa yang setia ikut merumuskan Konstitusi Republik Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan; Liem Kon Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, Drs. Yap Tjwan Bing.<sup>4</sup>

Ibarat dalam pepatah air susu dibalas air tuba, bukan sambutan dan perlakuan yang damai, tetapi ancaman dan sentiment rasialis yang diterima oleh kaum Tionghoa. Belum lagi diskriminasi kebijakan politik yang lahir dari rezim kekuasaan dari masa ke masa. Ketika rezim Orde Lama berkuasa etnis Tionghoa sudah merasakan diskriminasi ekonomi dalam bentuk larangan warga negara asing (WNA) Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibu kota provinsi dan kabupaten. Diskriminasi berikutnya muncul mengenai status kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru melalui ketentuan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Melalui ketentuan tersebut status orang Tionghoa beserta keturunannya status hukumnya masih dipertanyakan. Demikian juga dengan lahirnya Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa yang dikeluarkan

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 571.

<sup>4</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta; LP3ES, 1985), hlm. 144.

Presiden Soeharto, dan diikuti dengan SKB tiga menteri; Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan Jaksa Agung Ali Said, yang menegaskan budaya Tionghoa yang merupakan budaya nenek moyang mereka akan menghambat pembauran dengan budaya Indonesia.<sup>5</sup>

Menurut Lindsey setidaknya diskriminasi setidaknya dapat dibagi menjadi lima topik: diskriminasi dalam kartu identitas (KTP), larangan penggunaan nama Tionghoa, pembatasan bahasa Tionghoa di ranah publik, pembatasan akses dalam pendidikan dan pembatasan kesempatan ekonomi.<sup>6</sup>

Barulah ketika Reformasi berhasil menggulingkan Orde Baru yang represif, etnis Tionghoa merasakan angin keterbukaan. Presiden Gus Dur yang sangat menjunjung tinggi multikulturalisme dan demokrasi, menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Dengan Kepres itu, warga Tionghoa bebas memilih agama termasuk Konghucu, mengekspresikan barongsai dan tari naga, yang ketika Orde Baru dilarang ditampilkan di publik. Bahkan perayaan Imlek ditetapkan sebagai hari raya nasional melalui Kepres 192002/ yang ditandatangani Presiden Megawati.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mengenai kebijakan diskriminatif tersebut lihat Harian Suara Merdeka edisi cetak yang dikutip dalam Skripsi Ahmad Sidik Tri Haryanto, *Kehidupan Sosial Politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998-2008* (Yogyakarta; Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 4.

<sup>6</sup> Tim Lindsey, "Reconstituting the Ethnic Chinese in Post-Soeharto Indonesia: Law, Racial Discrimination, and Reform", dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapura: ISEAS, 2005), hlm. 53-57.

<sup>7</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2002 oleh

Era itulah yang membuka kebebasan kaum minoritas Tonghoa berani berekspresi dan memilih keyakinan tanpa paksaan. Termasuk sebagian orang Tionghoa memilih Islam yang minoritas jika dibandingkan dengan Tionghoa non-muslim. Disinilah Muslim Tionghoa sering disebut *minority within minority*, karena muslim di Tionghoa adalah minoritas di tengah minoritasnya etnis Tionghoa di Indonesia. Walaupun seperti kata Taylor, menghubungkan Tionghoa dan keaslian Islam di dunia Melayu-Indonesia adalah topik sensitif.<sup>8</sup>

Pada tahun 1970-an ketika isu munculnya Tionghoa Muslim, diperkirakan 150.000 Tionghoa menjadi muallaf. Tetapi angka tersebut dibantah oleh Junus Jahja karena dianggap tidak realistis. Versi Junus Jahja, jumlah Tionghoa Muslim hanya sekitar 0,5% dari jumlah keseluruhan orang Tionghoa di Indonesia yang berjumlah 2,5 juta orang atau sekitar 12.500 jiwa.<sup>9</sup> Jumlah muslim Tionghoa di Yogyakarta tentu lebih kecil lagi. Berdasarkan data monografi per kecamatan tahun 2007 sejumlah 788 Tionghoa yang muslim atau sekitar 8 persen dari 9.055 orang Tionghoa yang tinggal di Kota Yogyakarta.<sup>10</sup>

---

Presiden Megawati Soekarnoputri. Lihat, <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 15 November 2015.

<sup>8</sup> Jean Gelman Taylor, “*The Chinese and the Early Centuries of Conversion to Islam in Indonesia*”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapura: ISEAS, 2005), hlm. 148.

<sup>9</sup> Junus Jahja, *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa* (Jakarta: YUI, 1984), hlm. 304.

<sup>10</sup> M. Khamim, *Relasi Bisnis Komunitas Muslim Tionghoa dengan Tionghoa Non Muslim di Kota Yogyakarta; Studi Perspektif Jaringan Sistem Bisnis Tionghoa* (Yogyakarta: Skripsi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 32.

Gerakan dakwah Muslim Tionghoa bermula ketika pada tahun 1970-an H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien dan Kho Goan Tjin mendirikan sebuah organisasi yang bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Beberapa tokoh Islam di Yogyakarta yang aktif di Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) berinisiatif untuk mengajak segelintir Tionghoa Muslim di Yogyakarta mendirikan PITI koordinator wilayah. Mereka antara lain Prof. KH. Abdul Kahar Muzzakir, GBPH H. Prabuningrat, KH. M Djoenaid, KH. R. Therus, H. Muhadi Munawir, KH. Ali Maksum, dan KH. A. Mukti Ali.<sup>11</sup>

Pada periode pertama kepengurusan PITI DIY, terpilih sebagai ketua adalah H. Iksan Budi Santoso dan wakilnya KH. Ali Maksum, sedangkan sekretaris I dan II masing-masing adalah Ahmad Sutanto dan Moh Amien Mansoer. Jabatan sebagai bendahara dipegang oleh Yudi Kurniawan. Peresmian PITI Yogyakarta pada 20 September 1970, yang kemudian dijadikan sebagai hari berdirinya PITI Yogyakarta, dihadiri langsung oleh H. Karim Oey dan beberapa pejabat pemerintah pusat seperti Menteri Sosial H. M.S Mitardja dan Brigjen Muklas Prowi (penasihat keislaman TNI Angkatan Darat).<sup>12</sup>

Dalam bidang politik, PITI tidak berafiliasi kepada organisasi masyarakat atau partai politik tertentu. Kedekatan beberapa individu yang menjabat dalam struktur kepengurusan PITI dengan organisasi masyarakat atau partai politik tertentu sama sekali bersifat personal. Mengenai faktor kedekatan, salah satunya bisa dilacak dari proses keislaman dan lingkungannya. Di Yogyakarta Tionghoa Muslim memang cenderung bergabung dengan Muhammadiyah dan PAN, meskipun rujukan pada

---

<sup>11</sup> Fahmi Rafika Perdana, *Integrasi Sosial Muslim Tionghoa; Studi atas Partisipasi PITI DIY dalam Gerakan Pembauran* (Yogyakarta: Mystico-PITI, 2008), hlm. 85.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

organisasi dan parpol yang lain juga ada.<sup>13</sup> Pada umumnya suara mereka disalurkan kepada Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP dan PKB. Sementara itu pada pemilu 2009 yang lalu, lebih dari dua ratus orang etnis Tionghoa mencalonkan diri sebagai Caleg atau Calon Legislatif baik untuk DPR maupun yang untuk DPRD.

Peran Tionghoa Islam di Yogyakarta direpresentasikan oleh mantan Ketua PITI Yogyakarta yaitu Budi Setyagraha yang aktif di dunia politik dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi DIY (2004-2009-) dari Fraksi PAN. Selain Budi Setyagraha juga ada Hendra yang aktif di parpol PAN, walaupun istrinya masih Konghucu.

Terdapat pergeseran peran politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta terutama sebelum reformasi dan setelah reformasi. Sebelum reformasi, Muslim Tionghoa tidak bisa berperan menjadi calon anggota legislatif atau calon bupati karena hak-hak politiknya dibungkam oleh rezim Orde Baru. Pasca reformasi sudah mulai terbuka dengan munculnya caleg dan anggota legislatif dari muslim Tionghoa. Pergeseran juga terjadi atas preferensi pilihan politik, dari yang cenderung nasionalis sekuler beralih menjadi politik berasaskan Islam dan parpol Islam nasionalis.

### **B.1. Mengapa terjadi pergeseran peran politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta?**

Persoalan Tionghoa versus pribumi dalam sistem politik Indonesia hingga kini masih diwarnai ketegangan. Meski banyak yang sudah mengklaim, terutama dari kalangan Tionghoa sendiri, bahwa warga

---

<sup>13</sup> Lihat dalam Rezza Maulana, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim; Pengalaman Yogyakarta* (Jambi: Jurnal Kontekstualita IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Vol. 26 No. 1 Tahun 2011), hlm. 130.

Tionghoa yang lahir di Indonesia akibat kawin campur (warga keturunan), atau yang lahir di Tiongkok tanpa melalui kawin campur dan kemudian hijrah ke Indonesia (totok),<sup>14</sup> dan sudah hidup berpuluh-puluh tahun secara turun-temurun di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya. Benarkah warga Tionghoa yang sudah hidup turun temurun di tanah Indonesia, menjadikan Indonesia ini sebagai tanah airnya yang harus dibela, dan bukan lagi Tiongkok? Benarkah patriotisme warga Tionghoa yang hidup di Indonesia selama puluhan tahun tidak lagi berkiblat ke Tiongkok, melainkan ke Indonesia? Pertanyaan ini yang nanti menjadi pintu masuk untuk mengetahui kenapa terjadi pergeseran Muslim Tionghoa (PITI) dalam politik di Indonesia, termasuk di Yogyakarta.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, salah seorang tokoh Tionghoa, Prof. Liang Liji, dalam bukunya *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis: 2000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia* (2012) menjelaskan secara panjang lebar soal sikap warga keturunan di Indonesia terhadap bangsa dan negara Indonesia sendiri. Liji dalam bukunya itu menyatakan bahwa sejak kebangkitan nasional penduduk pribumi yang bertolak dari paham kebangsaan Indonesia muncul, kelompok etnis Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai warga asing yang tinggal di Indonesia, karenanya warga Tionghoa ini tidak dimasukkan ke dalam barisan nasional warga pribumi tersebut. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan tidak diterimanya warga Tionghoa menjadi anggota partai politik yang didirikan warga pribumi. PNI (partai Nasional Indonesia), partai politik yang didirikan Bung Karno

---

<sup>14</sup> Charles Coppel menjelaskan bahwa orang Tionghoa Totok adalah orang Tionghoa asli sedangkan untuk Peranakan adalah hasil kawin campur dengan penduduk pribumi setempat. Yang kedua adalah tempat kelahiran. Tionghoa Totok lahir di negeri asal mereka yaitu Tiongkok, sedangkan Tionghoa Peranakan lahir di negeri Indonesia. Lihat Charles Coppel, "Tionghoa Indonesia Dalam Krisis", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994



misalnya dalam anggaran dasarnya pada 1928 menyatakan: “ Yang boleh menjadi anggota partai ini hanyalah orang-orang Indonesia yang umurnya tidak kurang dari 18 tahun. Orang-orang bangsa Asia yang lain boleh diterima menjadi anggota luar biasa”.<sup>15</sup> Ini artinya warga Tionghoa tidak sepenuhnya diterima sebagai anggota partai politik pribumi.

Sementara itu dalam bidang ekonomi, para pedagang Tionghoa dianggap sebagai pesaing utama warga pribumi. Hal ini terutama di era Orde Baru, banyak warga Tionghoa lebih yang menguasai ekonomi di tanah air, daripada warga pribumi. Kenyataan ini kemudian menciptakan kesenjangan yang lebar antara warga keturunan dengan warga pribumi. Kesenjangan seperti inilah yang menciptakan kecurigaan terhadap warga Tionghoa di Indonesia. Hal inilah yang kemudian memantik konflik dan kerusuhan antara warga keturunan versus warga pribumi. Tragedi pertama adalah yang terjadi di Kudus pada 31 Oktober 1918. Kemudian yang belakangan adalah ketika reformasi meletus pada 1998.

Namun seiring dengan berkembangnya gerakan kemerdekaan nasional Indonesia, banyak warga Tionghoa yang langsung menggabungkan diri ke dalam barisan nasional Indonesia. Berdirinya Partij Tionghwa Indonesia pada 1932 merupakan bukti dari komitmen nasional itu.<sup>16</sup> Dalam hal ini telah terjadi semacam solidaritas sebagai sama-sama bangsa terjajah. Saat Tiongkok diagresi Jepang, misalnya, banyak warga pribumi yang menaruh simpati pada warga Tionghoa. Banyak tokoh Indonesia yang menyatakan perang melawan Jepang sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Tionghoa.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Liang Liji, *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis:2000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2012), hlm.540

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.541

<sup>17</sup> *Ibid*

Dengan terjadinya aksi solidaritas antar dua warga bangsa itu, ketika gerakan nasionalisme kemerdekaan Indonesia semakin berkembang, kalangan Tionghoa di Indonesia pun melepaskan paradigma lamanya yaitu dari paradigma ‘daun gugur kembali ke akarnya’ menjadi ‘bibit jatuh berkar di buminya’.<sup>18</sup> Ini merupakan manifesto politik kebangsaan warga Tionghoa di Indonesia. Mereka telah menyadari bahwa mereka sudah menjadi penghuni tetap dan secara turun temurun di bumi Indonesia; mereka lahir, besar dan menjalani kehidupan di bumi Indonesia, maka mereka secara aktif menerjunkan diri ke dalam arus gerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga patriotisme warga keturunan tidak lagi patriotisme yang berkiblat pada Tiongkok, melainkan berkiblat pada Indonesia.<sup>19</sup> Indonesia bagi warga keturunan merupakan tanah air dan tumpah darahnya, sementara Tiongkok adalah tanah leluhurnya, maka yang mereka harapkan adalah terjadinya kerja sama yang harmonis antara Indonesia dan Tiongkok untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran bersama.<sup>20</sup>

Meski demikian, masalah etnis tetap belum bisa diselesaikan. Jarak dan kesenjangan antara warga pribumi dan warga keturunan masih menganga lebar. Sehingga hingga kini sentimen ras dan etnisitas masih terus mengemuka. Maka wajar, konflik rasial dan kerusuhan anti Tionghoa di Indonesia masih terjadi. Ini artinya warga Tionghoa belum sepenuhnya diterima di dalam warga pribumi. Politik asimilasi, yang berusaha membaurkan antara warga Tionghoa dengan warga pribumi, masih belum berhasil. Karenanya, menurut Koentjoroningrat baik dalam segi sistem ekonomi maupun dalam sistem sosio-budaya, secara umum etnik Cina

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.542

<sup>20</sup> *Ibid*

tampak terpisah dari masyarakat lingkungan sekitarnya (Koentjaraningrat, 1993).

Masalah etnisitas yang kerap melahirkan diskriminasi dan sektarianisme di kalangan warga Tionghoa, akibat belum berhasilnya politik pembauran atau asimilasi tersebut itulah, yang membuat warga Tionghoa, termasuk Tionghoa yang Muslim untuk berkumpul dan berserikat dalam bentuk organisasi, sehingga lahirnya lahirnya PITI. Jadi lahirnya PITI ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi warga Tionghoa sebagai warga negara Indonesia, namun secara sosial-politik masih dianggap sebelah mata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pribumi. Artinya eksistensi PITI tidak bisa lepas dari konstalasi politik nasional. Untuk membuktikan tesis ini, maka bisa ditelusuri sisi sosial dan historis keberadaan PITI di Indonesia, termasuk di Yogyakarta.

### **PITI Yogyakarta dalam Konstalasi Politik Nasional**

Keberadaan PITI Yogyakarta tidak bisa lepas dari konstalasi politik nasional. Dalam sejarahnya, seperti yang dirilis dalam <http://piti.or.id/> (2008) dijelaskan bahwa PITI adalah gabungan dari Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dipimpin oleh Alm H.Abdusomad Yap A Siong dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) dipimpin oleh Alm Kho Goan Tjin. PITI dan PTM yang sebelum kemerdekaan Indonesia mula-mula didirikan di Medan dan di Bengkulu, masing-masing masih bersifat lokal sehingga pada saat itu keberadaan PIT dan PTM belum begitu dirasakan oleh masyarakat baik muslim Tionghoa dan muslim Indonesia.

Karena itulah, untuk merealisasikan perkembangan ukhuwah Islamiyah di kalangan muslim Tionghoa maka PIT yang berkedudukan di Medan dan PTM yang berkedudukan di Bengkulu merelakan diri pindah

ke Jakarta dengan bergabung dalam satu wadah yakni PITI. PITI didirikan pada waktu itu, sebagai tanggapan realistik atas saran Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah almarhum KH Ibrahim kepada almarhum H. Abdul Karim Oei bahwa untuk menyampaikan agama Islam kepada etnis Tionghoa harus dilakukan oleh etnis Tionghoa yang beragama Islam.

Visi PITI adalah mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam).<sup>21</sup> Misi PITI didirikan adalah untuk mempersatukan muslim Tionghoa dengan Muslim Indonesia, muslim Tionghoa dengan etnis Tionghoa non muslim dan etnis Tionghoa dengan umat Islam (<http://piti.or.id/:2008>).

Adapun jabatan abatan Ketua Umum PITI DIY telah diemban oleh beberapa orang:

- Ketua Umum Pertama: Iksan Budi Santoso
- Ketua Umum Kedua (19781979-) Muh. Hudi (The Dian Ie)
- Ketua Umum Ketiga (19791984-) Drs. H.Ahmad Susanto (Tan Heng Liang)
- Ketua Umum Keempat (19842003-) H. Budy Setyagraha (Huang Ren Chong)
- Ketua Umum Kelima (20032012-) Hj. Raehana Fatimah (Lie Sioe Fen)
- Ketua Umum Keenam (20132014-) H. Anggoro

---

<sup>21</sup> Visi PITI ini tertuang dalam Anggaran Dasar hasil Mukhtar Nasional II. Lihat did alam Hasil Mukhtar Nasional 3 PITT”, Hotel Equator Surabaya, 2-4 Desember 2005, hlm. 14.

- Ketua Umum Ketujuh (2014-2017-) Hj. Raehana Fatimah (Lie Sioe Fen)<sup>22</sup>

Kemudian Sejumlah kegiatan PITI DIY, yang telah dilakukan antara lain:

- Pembinaan warga, khususnya pengajian bulanan dan kunjungan silaturahmi.
- Kerjasama dengan pemerintah khususnya Departemen Agama dan pemerintah kota Yogyakarta, maupun organisasi-organisasi Islam
- Kerjasama dengan organisasi komunitas Tionghoa di DIY
- Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, seperti mengadakan seminar tentang perayaan imlek, bedah buku, dsb.
- Bakti sosial pada peringatan hari besar Islam dan tanggap bencana, antara lain gempa bumi tahun 2006 dan erupsi Merapi 2010.<sup>23</sup>

Adapun Pengurus harian PITI DIY (2013-2017-):<sup>24</sup>

Ketua Umum	: Hj. Raehana Fatimah (Lie Sioe Fen)
Wakil Ketua	: Prof(riset). Dr. H. Mochamad Salman Suprawhardana
Sekretaris Umum	: Handoko
Wakil Sekretaris	: Grace Lestariana Wonoadi, SIP, M.Si.
Bendahara Umum	: Rina Jumat
Wakil Bendahara	: Sri Hartati

---

<sup>22</sup> <http://pitiyogyakarta.com/index.php/profil/2-piti-yogyakarta-selayang-pandang> (akses: 16/12/2016)

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

- Pengelola web PITI : 1. Prof. Dr. H. M. Salman Suprawhardana  
 2. Drs. H. Ma'ruf Siregar  
 3. Sukamto, S.T, M.T.

Program utama PITI adalah menyampaikan tentang (dakwah) Islam khususnya kepada masyarakat keturunan Tionghoa dan pembinaan dalam bentuk bimbingan, kepada muslim Tionghoa dalam menjalankan syariah Islam baik di lingkungan keluarganya yang masih non muslim dan persiapan berbaur dengan umat Islam di lingkungan tempat tinggal dan pekerjaannya serta pembelaan/ perlindungan bagi mereka yang karena masuk agama Islam, untuk sementara mempunyai masalah dengan keluarga dan lingkungannya. Sampai dengan saat ini, agama Islam tidak dan belum menarik bagi masyarakat keturunan Tionghoa karena dalam pandangan mereka, agama Islam identik dengan kemunduran, kemalasan, kebodohan, kekumuhan, pemaksaan dan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok radikal dan teroris. (darkbb.com:212008/05/).

Keberadaan PITI di Indonesia lambat laun semakin berkembang, sehingga membuka cabang-cabangnya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Indonesia. Keberadaan orang Tionghoa Muslim di Yogyakarta ini kemudian turut menjadi faktor lahirnya PITI. Secara historis, seperti dijelaskan dalam <http://www.pitivyogyakarta.com> (2016) bahwa berdirinya kesultanan Yogyakarta sebagai hasil perjanjian Giyanti pada 1755 sendiri merupakan proses panjang. Hal yang perlu diketahui bahwa proses politik Kraton bukan hanya melibatkan warga pribumi-Jawa, melainkan juga melibatkan secara langsung etnis Tionghoa. Persoalan politik Kraton tersebut terjadi karena dilatarbelakangi ketidakpuasan banyak kerabat kesultanan Mataram di Kartasura karena Paku Buwana II membuat «perjanjian panaraga» dengan Belanda.

Bibit pemberontakan pada kekuasaan Paku Buwana II berawal dari kerusuhan anti Tionghoa yang meluas dengan korban sangat banyak pada 1740 di Batavia yang dikenal dengan *De Chineezen Grootemoord*. Banyak warga Tionghoa Muslim yang meninggal dunia akibat kerusuhan ini. Pertempuran yang tidak seimbang ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai pembantaian yang dilakukan penjajah Belanda terhadap Muslim Tionghoa. Saat itu sekitar 10.000 Tionghoa Muslim telah dibantai. Peristiwa tersebut kemudian diikuti dengan terjadinya peristiwa «perang Wolanda-Tionghoa» yang meluas sepanjang pantai utara Jawa. Benteng-benteng Belanda yang ada di sepanjang pantai utara Jawa mulai dari Jepara, Demak, Rembang semua diserbu dan dihancurkan etnis Tionghoa.

Saat inilah terjadi persekutuan antara warga pribumi Mataram dengan Tionghoa untuk melawan penjajah Belanda. Rakyat Kartasura (Mataram) dan etnis Tionghoa yang menaruh dendam dengan Belanda menyerbu benteng Belanda dan membunuh semua tentara kolonial itu. Pada 30 Juni 1742 laskar Tionghoa yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi (Sunan Kuning) , juga menyerang keraton untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan etnis Tionghoa dan rakyat Mataram. Inilah tuntutan politik warga Tionghoa terhadap penguasa pribumi, Sultan. Saat itu, warga Tionghoa seolah tidak dilindungi oleh Kraton ketika ditindas oleh Belanda.

Etnis Tionghoa dalam sejarahnya telah berhasil menduduki keraton Mataram selama enam bulan, namun berhasil diusir oleh Belanda atas permohonan Paku Buwana II. Peristiwa inilah yang di dalam sejarah Jawa dikenal dengan Geger Kartasura atau Geger Pacinan. Ini merupakan puncak krisis yang muncul setelah sekian lama telah terjalin bisnis yang saling menguntungkan antara pihak keraton-Tionghoa. Keterlibatan Belanda dalam perebutan Keraton menyebabkan banyak kerabat dan abdi dalem keraton tidak senang dan terus melanjutkan perjuangan melawan

Belanda. Perlawanan terhadap Belanda ini sendiri dipimpin langsung oleh adik kandung PB II, Pangeran Harya Mangkubumi. PH Mangkubumi menghimpun semua sekutu yang punya dendam dengan Belanda, termasuk Muslim Tionghoa. Bergabungnya Muslim Tionghoa yang punya pengalaman dan keahlian tempur merupakan mitra perjuangan yang efektif seperti Tumenggung Jayaningrat dari Pekalongan.

Awal mula keberadaannya, Muslim Tionghoa di Yogyakarta ditempatkan di utara keraton di Beskalan dan Ketandan. Daerah inilah yang kemudian menjadi kampung awal Muslim Tionghoa di Yogyakarta. Mereka bersarna masyarakat pribumi Yogyakarta menghidupkan perekonomian dengan membuka pasar Bringharjo. Kemampuan berdagang merupakan keahlian yang dimiliki Muslim Tionghoa sejak dulu. Relasi bisnis ini mudah dibangun sejak masa Sultan Agung Hanyokrokusumo saat membangun kasultanan di Kota Gede dengan menguasai ekspor beras dan kayu jati

Perekonomian Yogyakarta yang baru berdiri, dengan segera pulih salah satunya berkat bantuan etnis Tionghoa dalam menyumbang pajak jalan, menyewa tanah dan berdagang. Etnis Tionghoa kemudian mendapatkan tempat istimewa di keraton. Hak-hak mereka dilindungi Kraton, di antaranya adalah diberlakukannya UU hukum tradisional orang Jawa, yang menetapkan denda (diyut, (bahasa Arab) yang berarti uang darah) yang dijatuhkan atas pembunuhan etnis Tionghoa haruslah dua kali lebih besar dari pada denda yang harus dibayarkan ketika membunuh orang Jawa ( <http://www.pitiyogyakarta.com> :2016)

Karena mendapatkan perlindungan hukum dari Kraton, maka banyak etnis Tionghoa dari berbagai daerah lain berdagang di Yogyakarta, seperti dari Kedu, Wonosobo, Kebumen dan Banyumas. Salah seorang



Tionghoa mulai berdagang ke Yogyakarta diantaranya adalah Cei Tek Ho dari Banyumas, saudara dan Oei Tek Liong yang merupakan kapitein Tionghoa Kedu sampai (19551793-. Sepeninggal To In, kedudukan kapitein Yogyakarta digantikan Oei Tek Ho (17931303-). Sedangkan kedudukan Oei Tek Liong sebagai kapitein Kedu kemudian diserahkan kepada anak angkatnya, Tan Jin sing (17931903-)

Sekitar benteng Vredeburg menjadi kampung orang Belanda disekitar Loji Kecil yang kemudian meluas sampai Kota Baru. Seiring menetapnya orang Belanda di Yogyakarta, etnis Tionghoa mulai berdatangan dan menetap. Bagi Belanda dan keraton, keberadaan etnis Tionghoa dirasakan sangat penting untuk menjamin keberadaan stok barang yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat pribumi Yogyakarta. Keberadaan Muslim Tionghoa sampai datangnya Gubernur Jenderal VOC Willem Daendels (18081811-) masih dibawah kendali keraton. Sedangkan hubungan Muslim Tionghoa dengan Belanda hanya bersifat bisnis saja.

Kedatangan etnis Tionghoa sampai 1808 ke pusat kerajaan Yogyakarta terbilang sangat sedikit, hanya 65 orang, jika dibandingkan dengan warga Tionghoa yang pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan lain di Jawa. Komunitas Tionghoa ini diberi tempat di sekitar pasar Bringarjo. Untuk mempermudah menarik pajak dari warga Tionghoa, maka tugas ini dilakukan oleh kapitein Tionghoa. Penunjukkan opsir ini dipilih dari etnis Tionghoa yang terkaya yang ada di kampung Tionghoa. Dia ditunjuk oleh keraton karena sudah dianggap sebagai kawula Yogyakarta. Sebagai saudagar terkaya, maka Oie Tek Ho ditunjuk sebagai kapitein Tionghoa Yogyakarta yang kedua.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <http://www.pitivyogyakarta.com> (2016)

Anak Oie Tek Ho yang bernama U Li juga dinikahkan dengan Tan Djien sing yang merupakan anak dari RA. Patrawijaya, salah satu putri RM. Kunting Keturunan ketiga Sunan Amangkurat I (Tegal Arum), yang diangkat anak oleh Oie Tek Liong. Tan Djien Sin ditunjuk sebagai Kapitein Tionghoa (1803-1812-) untuk menggantikan Oie Tek Ho karena sakit. Tan Djien Sing kemudian ikut berjasa menaikkan tahta Sultan HB III dalam konflik internal Keraton, dan mendapat gelar Tumenggung Secodiningrat dan menjadi Bupati Yogyakarta pada tahun 1812.<sup>26</sup>

Diangkatnya Tan Djien Sing sebagai bupati Yogyakarta tersebut juga didukung oleh Oie Tek Biauww yang merupakan adik Oie Tek Ho dan merupakan paman Tan Djien Sing. Oie Tek Biauww sendiri berprofesi sebagai abdi dalem keraton dengan gelar tumenggung pedoman Reksonegoro I, yang merupakan penasihat keraton dalam bidang kerohanian (keagamaan). Diangkatnya kapitein Muslim Tionghoa dan juga menjabat Bupati Yogyakarta, diikuti oleh hampir semua orang Tionghoa Yogyakarta.<sup>27</sup>

Keluarga Tionghoa Jawa yang telah masuk Islam dan memakai nama Islam lalu bergabung dengan masyarakat setempat atau masyarakat pribumi yang berprofesi sebagai pedagang yang berlokasi di sekitar masjid kota. Para Muslim Tionghoa, awalnya tidak dikonsentrasikan ke dalam satu lokasi. Mereka cenderung menyebar, bergabung dan membaaur dengan penduduk setempat.

Dengan demikian, sejak awal kelompok Muslim Tionghoa di Yogyakarta justru lebih bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat (pribumi) Yogyakarta. hal ini kemudian membuat masyarakat

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

Tionghoa non-Islam menjaga jarak dari aktivitas sosial dan keagamaan orang pribumi. Karena masyarakat Tionghoa yang ada di Jawa sudah sangat mengakar dalam lingkungan dan kultur Jawa, maka hubungan mereka dengan negara asalnya, Tiongkok, hanya bersifat historis-emosional belaka.

Dengan kedekatan tersebut, pada saat meletusnya perang Diponegoro (1825-1830-) banyak orang Tionghoa ikut bertempur dibelakang Diponegoro.<sup>28</sup> Secara langsung orang Tionghoa memang merasakan dampak perang, dan pilihan berpihak kepada Belanda karena selama ini sudah mendapatkan keistimewaan berpihak kepada pangeran Diponegoro untuk menuntut dendam pembantaian di Batavia dan sepanjang pantai utara Jawa tahun 1740. Sebagian orang Tionghoa di Magelang berpihak kepada Belanda dan dipersenjatai lengkap, sedangkan mayoritas Muslim Tionghoa Yogyakarta memihak pada pangeran Diponegoro.<sup>29</sup> Trauma pembantaian Belanda di Batavia pada tahun 1740 dan identitas Muslim menjadi alasan banyak orang Muslim Tionghoa melibatkan diri dalam peperangan.<sup>30</sup>

Dari perjalanan yang panjang dan berliku seperti itulah Muslim Tionghoa di Yogyakarta masih eksis hingga saat ini dan belakangan mendirikan PITI. Jadi pendirian PITI di Yogyakarta merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika Muslim Tionghoa yang panjang di atas yang ada di Yogyakarta. Terkait dengan volumenya, jumlah Tionghoa Muslim di Yogyakarta dapat dilacak berdasarkan data monografi per kecamatan

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

tahun 2007 sejumlah 788 jiwa (8 persen) dari 9.055 orang Tionghoa yang tinggal di Kota Yogyakarta<sup>31</sup>.

Meski proses terjadinya Islamisasi di kalangan Tionghoa Indonesia, khususnya di Yogyakarta, namun dalam konteks Indonesia modern, kemunculan Muslim Tionghoa baru mencuat pada 1970-an. Saat itu diperkirakan ada sekitar 150.000 Tionghoa yang masuk Islam di Indonesia.<sup>32</sup> Tapi angka ini dianggap tidak realistis oleh H. Junus Jahja. Menurutnya, jumlah Tionghoa Muslim hanya sekitar 0,5% dari jumlah keseluruhan orang Tionghoa di Indonesia yang berjumlah 2,5 juta orang atau sekitar 12.500 jiwa.<sup>33</sup>

Sebagai sebuah kelompok Islam, Muslim Tionghoa Yogyakarta juga merasa mempunyai kewajiban untuk berdakwah menyebarkan Islam. Dari sinilah kemudian Muslim Tionghoa di Yogyakarta juga mendirikan PITI, yang aktivitasnya sesuai dengan garis dan visi-misi organisasi PITI pusat di atas. Gerakan dakwah Muslim Tionghoa tersebut mulai menggeliat menyebar di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta, sekitar 1970-an lewat organisasi PITI yang dipimpin oleh H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien dan Kho Goan Tjin. Peresmian PITI Yogyakarta pada 20 September 1970, yang kemudian dijadikan sebagai hari berdirinya PITI Yogyakarta, dihadiri langsung oleh H. Karim Oey dan beberapa pejabat pemerintah

---

<sup>31</sup> M. Khamim, *Relasi Bisnis Komunitas Muslim Tionghoa dengan Tionghoa Non-Muslim di Kota Yogyakarta: Studi Perspektif Jaringan Sistem Bisnis Tionghoa*, Skripsi (tidak dibukukan) pada Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 32

<sup>32</sup> Rezza Maulana, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta*, dalam *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 26, No. 1, 2011, hlm.122

<sup>33</sup> Junus Jahja, "3 Tahun Dakwah di Kalangan Keturunan Tionghoa", dalam Junus Jahja (ed.), *Zaman Harapan bagi Keturunan Tionghoa*, (Jakarta: YUI, 1984), hlm. 304

pusat seperti Menteri Sosial H. M.S Mitardja dan Brigjen Muklas Prowi, seorang penasihat keislaman TNI Angkatan Darat.<sup>34</sup>

Pendirian PITI di Yogyakarta ini berawal dari inisiatif beberapa tokoh Islam di Yogyakarta yang aktif di Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI). Mereka mengajak beberapa tokoh Tionghoa Muslim di Yogyakarta mendirikan PITI koordinator wilayah Yogyakarta. Di antara para tokoh PDHI yang mempunyai inisiatif mendirikan PITI tersebut Prof. KH. Abdul Kahar Muzzakir, GBPH H. Prabuningrat, KH. M Djoenaid, KH. R. Therus, H. Muhadi Munawir, KH. Ali Maksum, dan KH. A. Mukti Ali.<sup>35</sup>

Jadi dilihat dari awal pendiriannya ini, pendirian PITI Yogyakarta justru diinisiasi oleh tokoh-tokoh Muslim yang bukan Tionghoa, dan pengurusnya pun di awal-awal pendiriannya ada yang bukan Tionghoa. Sebab Pada periode pertama kepengurusan PITI DIY, yang terpilih sebagai ketua adalah H. Iksan Budi Santoso dan wakilnya KH. Ali Maksum, sedangkan sekretaris I dan II masing-masing adalah Ahmad Sutanto dan Moh Amien Mansoer. Jabatan sebagai bendahara dipegang oleh Yudi Kurniawan.<sup>36</sup> KH. Ali Maksum, yang saat itu merupakan pengasuh utama Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta, jelas bukan orang Tionghoa.

Namun, dalam perkembangannya pemerintah melalui Jaksa Agung merasa keberatan dengan penggunaan istilah “Tionghoa” dalam organisasi

---

<sup>34</sup> Rezza Maulana, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta.....*hlm.123

<sup>35</sup> Fahmi Rafika Perdana, *Integrasi Sosial Muslim Tionghoa: Studi atas Partisipasi PITI DIY dalam Gerakan Pembauran*, (Yogyakarta: Mystico-PITI, 2008), hlm. 35.

<sup>36</sup> Rezza Maulana, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta.....*hlm.123

tersebut. Sebab istilah itu dianggap eksklusif dalam akronim PITI, yakni “Persatuan Islam Tionghoa Indonesia”. Maka lewat surat tertanggal 15 Juli 1972 No. MA/2441972/, Menteri Agama RI H.A. Mukti Ali meminta untuk menghapuskan kesan eksklusivitas dan primordialitas dan mempercepat proses asimilasi dan peleburan warga negara keturunan.<sup>37</sup> Oleh karena itu, pimpinan PITI pusat membubarkan PITI dengan singkatan “Persatuan Islam Tionghoa Indonesia” dan mendirikan organisasi baru bernama “Persatuan Iman Tauhid Indonesia” yang juga disingkat PITI.<sup>38</sup> Tapi, singkatan ini kemudian berubah lagi. Dalam rapatnya pada bulan Mei 2000, dalam menetapkan bahwa kepanjangan PITI dikembalikan menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (<http://mayotte.ep.web.id:2016>).

Dalam perjalanannya, sebagaimana organisasi yang lain yang mengalami pasang surut, maka begitu juga dengan PITI Yogyakarta, organisasi ini pernah mengalami kemandekan dalam aktivitas dakwahnya di kalangan orang Tionghoa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan organisasi tersebut mengalami stagnansi di antaranya adalah, pertama, ketua baru yang menggantikan ketua lama tak menonjolkan ketionghoannya. Kedua, keterputusan koordinasi PITI Yogyakarta dengan PITI pusat karena PITI pusat mengalami stagnasi akibat kepengurusannya dikendalikan militer. Ketiga, belum maksimalnya manajemen organisasi, utamanya kesulitan dalam mendapatkan dana operasional. Hal ini salah satunya dikarenakan belum bekerjanya mekanisme iuran anggota. Keempat, jumlah anggota yang sedikit akibat enggan orang Tionghoa Muslim bergabung dalam organisasi akibat stigma bahwa masuk Islam membuat derajat sosialnya

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.124

<sup>38</sup> *Ibid*

menurun ke tingkat kaum pribumi.<sup>39</sup> Baru pada 1980-an, PITI Yogyakarta mulai aktif kembali setelah dinahkodai oleh Muslim Tionghoa yang berprofesi sebagai pengusaha sukses, Budi Setyagraha.

### **Geliat Politik Paska Reformasi**

Ketika gerakan reformasi meletus pada 1998, momentum ini turut mempengaruhi langkah PITI ke depannya. Di masa ini seperti dikatakan Rezza Maulana muncul kesadaran dari Tionghoa Muslim bahwa persoalan pembauran bukan semata masalah horisontal antara orang Tionghoa dan non-Tionghoa, melainkan juga masalah vertikal yang terkait kebijakan pemerintah terhadap orang Tionghoa secara umum. Kesadaran ini kemudian mendorong Tionghoa Muslim untuk memperjuangkan kembali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan bangsa Indonesia.

Namun sebenarnya orientasi politik PITI Yogyakarta ini sudah muncul semenjak kelahirannya pada 1970-an. Menurut Suryadinata, fenomena orang Tionghoa yang masuk Islam pada 1970-an bukan hanya karena terjadinya peristiwa kup tahun 1965, melainkan juga untuk merespon perkembangan Islam di panggung sosial politik, interaksi intensif dengan Muslim yang ada di sekitar mereka, dan beberapa hal lainnya yang lebih pragmatis seperti memperlancar bisnis atau menyelesaikan “masalah Tionghoa” di Indonesia.<sup>40</sup> Tentu saja di antara masalah yang menimpa Tionghoa salah satunya adalah masih terjadinya diskriminasi warga Tionghoa dalam konteks politik Indonesia.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, terj. Dede Oetomo, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 94-99.

Era Reformasi ini memberikan angin segar dan ruang gerak yang lebih leluasa bagi etnis Tionghoa untuk dapat kembali menikmati hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia seutuhnya, termasuk menghidupkan kembali nilai-nilai budayanya. Hal ini terutama di masa presiden Abdurrahman Wahid yang menerbitkan Kepres No 62000/ yang ditandatangani pada 17 Januari 2000 sembari mencabut Inpres No 14 tahun 1967 yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 6 Desember 1967. Inpres yang dikeluarkan Presiden Soeharto tersebut berisi larangan bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan kepercayaan dan tradisi mereka. Inpres tersebut benar-benar membuat etnis Tionghoa tidak bisa berkutik. Dengan kebijakan Gus Dur tersebut warga Tionghoa bebas mengekspresikan kembali budayanya termasuk perayaan Imlek. Bagi Tionghoa muslim di Yogyakarta, merayakan Imlek pada tahun 2003 merupakan yang pertama kalinya, yaitu tepatnya di bulan Februari dan bertempat di Masjid Syuhada, Kota Baru<sup>41</sup>.

Karena pada era reformasi ini, banyak Tionghoa Muslim, termasuk PITI Yogyakarta yang turut berpartisipasi di dalam politik. Pada awalnya, pada Pemilu 1999 mereka masih malu-malu untuk masuk politik. Namun di 1999 itu juga ada beberapa anggota DPR pada tingkat lokal maupun yang berada di pusat dari kalangan etnis Tionghoa. Mereka diantaranya Ir. Tjiandra Wijaya Wong dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Alvin Lie Ling Piao dari Partai Amanat Nasional,<sup>28</sup> Kwik Kian Gie,<sup>29</sup> Ir. Engartiato Lukita dari Golkar dan LT Susanto dari Partai Bhineka Tunggal Ika, dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat juga ada beberapa Tionghoa seperti Hartati Murdaya Poo dari Walubi yang mewakili utusan golongan

---

<sup>41</sup> Iman Astri Okta Ayuana, *Organisasi dan Kegiatan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Yogyakarta*, Tugas Akhir Program Studi D III Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2007. hlm.9.



serta Daniel Budi Setiawan yang merupakan wakil utusan daerah Jawa Tengah.<sup>42</sup> Sementara itu dalam konteks Yogyakarta, di antara tokoh PITI DIY yang menjadi anggota DPRD adalah Budi Setyagraha<sup>43</sup>, dari PAN periode 19992004-.<sup>44</sup>

Pola atau model orang-rang Tionghoa, termasuk PITI dalam partisipasi politik, menurut T.J Lan ada dua yang pertama adalah mereka cenderung menunjukkan atau menonjolkan identitas etnisnya serta

---

<sup>42</sup> Benny G. Setiono, dalam makalahn “Peranan Ekonomi dan Politik Tionghoa Indonesia: Dialektika Politik Etnis dan Globalisasi”

<sup>43</sup> Nama aslinya adalah Wong Chong, ia lahir di Solo (JawaTengah) pada tanggal 20 Nopember 1943, setelah memeluk Islam namanya diganti menjadi Budi Setyagraha. Ia anak kedua dari pasangan Wong Kim Khay dan Pho Fu Lan, yang beragama Budha. Lucunya, justru sejak kecil ia merasa hidup tanpa agama, ia hanya mengikuti filosofi Tionghoa, konsep tanpa Tuhan. Seperti kebanyakan Tionghoa lainnya, yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berdagang, ia melakukan aktivitas perdagangan. Ia termasuk pedagang yang sukses. Usaha toko besi ABC di jalan Kyai Moio Yogyakarta, berkembang pesat. Tanpa Tuhan di puncak kesuksesannya, terbersit keinginannya untuk bersyukur atas keberhasilannya, akan tetapi ia bingung harus bersyukur kepada siapa? Sedang ia merasa tidak punya agama dan tidak tahu siapa Tuhannya. Namun ia yakin, kesuksesannya tidak datang begitu saja, pasti ada yang memberi. Tetapi, siapa yang memberi? Apakah kesuksesannya ini turun dari langit? Inilah pertanyaan yang selalu membuat jiwanya gundah dan gelisah. Sekaligus menjadi pertanyaan dasar, saat menuju puncak hidayah. Selain diganggu pertanyaan, setiap sore telinganya selalu terusik azan Maghrib, sebagai pertanda panggilan sholat bagi umat Islam. Sekian lama mendengar suara azan. Muncul bisikan yang mengesankan jiwanya. “Mungkin, inilah yang memberi rezeki saya selama ini”, katanya dalam hati, terutama kesuksesannya. Mungkinkah usaha yang dibangun sejak tahun 1978 dan berkembang pesat berkat Tuhan-nya umat Islam? Itu juga pertanyaan yang amat mengganggu dan selalu muncul dibenaknya. Saya sibuk mencari Tuhan itulah saya kenal dengan Drs. Ma’ruf Siregar, guru agama Islam di SMU Negeri 4 Yogyakarta,” ujar Budi. Lihat dalam <http://pitiyogyakarta.com/index.php/profil/tokoh/22-wong-chong-budi-setyagraha> (2016)

<sup>44</sup> Fahmi Rafika Perdana, *Integrasi Sosial Muslim Tionghoa.....*hlm.44

memperjuangkan hak mereka sebagai golongan etnis Tionghoa. Sebagai contoh dengan mendirikan Partai Tionghoa. Kedua, mereka sendiri tidak mau menjadikan agama sebagai gerakan basis, karena lebih baik dengan melalui persamaan hak, yaitu dengan cara mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika.

Apabila dilihat dari kronologis dan latar belakang sosial-historis di atas, maka bisa diketahui bahwa berdirinya PITI pada awal mulanya adalah untuk berdakwah. Hal ini terkait dengan tanggung jawab warga Tionghoa Muslim untuk menjalankan misi agamanya, Islam, sebagaimana yang juga dilakukan oleh umat Islam lainnya. Namun pada perkembangannya, PITI juga memainkan peranan politik, khususnya paska Reformasi. Reformasi merupakan momentum bagi warga Tionghoa, termasuk yang tergabung dalam PITI, untuk meraih hak-haknya sebagai warga negara. Sebab dalam kenyataannya hingga, warga negara dari kalangan Tionghoa masih mendapatkan diskriminasi dan marginalisasi. Karenanya, dengan hadirnya PITI ini dijadikan sebagai salah satu sarana warga Tionghoa Muslim untuk menuntut hak-haknya sebagai warga negara.

Bagi warga Tionghoa yang tergabung di dalam PITI bahwa persoalan diskriminasi dan segregasi hak-hak kelompok Tionghoa sebagai warga negara Indonesia bukan hanya persoalan kultural, melainkan juga oleh persoalan struktural. Artinya banyak kebijakan dan regulasi di Indonesia yang masih diskriminatif warga Tionghoa. Seperti sudah disinggung di atas, para tokoh PITI, termasuk yang ada di Yogyakarta memandang bahwa persoalan pembauran bukan semata masalah horisontal antara

orang Tionghoa dan non-Tionghoa, melainkan juga masalah vertikal yang terkait kebijakan pemerintah terhadap orang Tionghoa secara umum.<sup>45</sup>

Salah satu bentuk politik yang dianggap diskriminatif oleh warga Tionghoa di Yogyakarta adalah kasus kepemilikan tanah. Larangan bagi warga negara yang diberi label non-pribumi untuk memiliki hak milik tanah di Yogyakarta, secara tegas tertulis dalam Surat Instruksi Wakil Gubernur berjudul “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”, yang ditandatangani Paku Alam VIII, pada 5 Maret 1975. Saat itu Wakil Gubernur DIY. Paku Alam VIII mengeluarkan peraturan Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak atas Tanah di Jogja kepada WNI non pribumi. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa WNI non pribumi tidak bisa memiliki hak milik atas tanah yang ia beli.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Rezza Maulana, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta.....*hlm.125

<sup>46</sup> Terkait berita tentang peraturan tentang larangan bagi warga non-pribumi untuk memiliki tanah di Yogyakarta ini juga diekspos dalam [http://www.lamudi.co.id/\(7/10/2016\)](http://www.lamudi.co.id/(7/10/2016)), di dalam media diinformasikan Sepertinya Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa atau non pribumi masih belum bebas untuk membeli properti di Yogyakarta, pasalnya di sana saat ini ada aturan yang melarang bagi warga keturunan memiliki tanah atau rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) walaupun mereka sudah berstatus sebagai WNI. Karena adanya aturan tersebut, tak heran banyak warga non pribumi merasa dirugikan karena mereka hanya bisa membeli properti dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), padahal mereka sudah berstatus sebagai WNI yang sebenarnya diwilayah lain seperti Jakarta misalnya hal tersebut sudah diperbolehkan. Permasalahan ini bermula pada tahun 1975, saat itu Wakil Gubernur DIY. Paku Alam VIII mengeluarkan peraturan Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak atas Tanah di Jogja kepada WNI non pribumi. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa WNI non pribumi tidak bisa memiliki hak milik atas tanah yang ia beli. Pemerintah provinsi Yogyakarta berkilah, peraturan ini sengaja mereka adakan sebenarnya untuk melindungi kepentingan rakyat

Setelah instruksi itu dikeluarkan, hampir tidak ada WNI nonpribumi, termasuk warga Tionghoa, yang bisa memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah biar pun cuma sejengkal. Jika ada yang memiliki SHM dan diketahui oleh negara, maka tanah akan diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).<sup>47</sup> Instruksi itu massif dilaksanakan setidaknya sampai tahun 1984. Pada tahun 1983, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Gubernur sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, mengumumkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 berlaku penuh di Yogyakarta.<sup>48</sup>

Pemberlakuan UUPA itu pun disambut baik oleh GBPH Hadiwinoto, anggota DPRD DIY yang juga anak dari Sri Sultan HB IX. Pada wawancara di Majalah Tempo edisi 31 Maret 1984, dia menyambut positif pemberlakuan UUPA, sebab selama itu di Yogyakarta ada banyak jenis bukti kepemilikan tanah. Mulai dari leter E (hak milik sementara), leter D (hak milik), hingga leter C (hak garap), (<https://tirto.id:52016/10/>).

Dalam prosesnya, kata ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad), Willie Sebastian, seseorang yang memiliki tampang keturunan

---

kecil dari kalangan menengah ke atas. Karena di khawatirkan kalangan menengah ke atas akan memonopoli sebagian besar tanah di Yogyakarta dan kalangan menengah atas tersebut, diklasifikasikan oleh Pemprov Yogyakarta sebagai WNI non pribumi.

⁵ Selain itu sebelumnya di Merdeka.com (7/9/2015) juga sudah diekspos bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Yogyakarta, Arie Yuwirin menegaskan memang warga negara Indonesia nonpribumi tidak boleh memiliki hak untuk memiliki tanah alias SHM (surat hak milik) di Yogyakarta. BPN pun meluruskan pernyataan Sultan Hamengku Buwono X, terkait permasalahan tanah bagi warga Tionghoa seperti yang dilaporkan Granad (Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

<sup>47</sup> [https://tirto.id \(5/10/2016\)](https://tirto.id(5/10/2016)).

<sup>48</sup> *Ibid*

harus menunjukkan surat lahir, surat nikah, surat lahir orang tua untuk mendapatkan hak milik tanah untuk membuktikan kalau mereka bukan warga keturunan.<sup>49</sup> ‘Kalau ketahuan ayahnya Tionghoa, maka langsung dicabut hak kepemilikan tanah’ kata Sebastian.<sup>50</sup> Sebastian merupakan salah satu korban pertaruhan ini. Pada tahun 2006 dirinya kena gusur, lalu mendapatkan ganti tanah seluas 280 meter per segi. Karena ketahuan dirinya Tionghoa, maka tanah yang asalnya berstatus hak milik itu diubah menjadi HGB (Hak Guna Bangunan).

Diskriminasi itu juga menimpa warga Tionghoa lainnya, Zaelous Siput Lokasari, yang biasa dipanggil Siput. Peristiwa yang terjadi pada 11 April 2016 itu masih. Pagi itu, Siput mendapat panggilan dari BPN Kulonprogo lantaran dia akan membalik nama kepemilikan tanah seluas 2.125 meter persegi di Triharjo, Kulonprogo atas nama istrinya, Veronika. Tanah itu baru saja dibeli seharga Rp 605.625.000 pada tahun 2015.<sup>51</sup> Karena Siput ternyata warga keturunan Tionghoa, maka dirinya tidak bisa mempunyai hak milik tanah. Setiap kali ingat peristiwa tersebut Siput langsung emosional. Sampai sekarang dia masih tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang petugas negara, pelayanan masyarakat, justru memiliki pola pikir yang diskriminatif dan sektarian. Siput lantas mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dia juga meminta Muhammad Fadil, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kulonprogo itu untuk mengeluarkan KTP. Permintaan Siput tak dipenuhi. Maka, semakin meledak amarah Siput.

---

<sup>49</sup> Keterangan Sebastian dalam wawancara pada 3 Desember 2016. Sebelumnya pada 2015 Sebastian juga mengeluarkan statemen yang sama, seperti yang diekspos <http://www.rappler.com/indonesia/106231-wni-keturunan-tidak-bisa-punya-shm> (17/09/2015)

<sup>50</sup> Keterangan Willie Sebastian dalam wawancara pada 3 Desember 2016

<sup>51</sup> Wawancara dengan Zaelous Siput Lokasari pada 1 Desember 2016

“Lho, kita sama-sama WNI di KTP. Kenapa harus ada perbedaan begini? Apa gunanya kemerdekaan ini kalau masih ada diskriminasi?”<sup>52</sup> begitulah kata Siput. Pernyataan itu pula yang dia lontarkan saat dirinya berada Kantor BPN Kulonprogo.

Akibat itulah, Siput mulai menghubungi Sultan, sebagai Raja sekaligus Gubernur DIY, Oktober 2016 yang lalu untuk meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini membatalkan Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 1975 lalu, berisi larangan warga nonpribumi memiliki tanah.

«Kenapa harus ada diskriminasi ras... Orang Tionghoa bekerja setengah mati mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan beli tanah hak milik, kenapa hak milik dipaksa untuk dirampas dikembalikan ke negara dan orang tersebut diberi hak sewa. Orang Tionghoa ataupun orang India yang dianggap non pribumi... Kenapa sampai begitu?», begitulah kata Siput saat ditanya mengenai mengenai tuntutannya terhadap Sultan.<sup>53</sup>

Jadi terkait dengan persoalan di atas bahwa mengapa terjadi pergeseran peran politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta, tidak lain adalah karena kondisi mereka yang secara politik masih berada dalam diskriminasi. Hak-hak mereka sebagai warga negara banyak yang belum dipenuhi. Diskriminasi politik yang sifatnya struktural dan sistematis yang menimpa mereka inilah yang mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam

---

<sup>52</sup> *Ibid*, sebelumnya pernyataan yang bermakna sama diungkapkan dalam <https://tirto.id> ( 5/10/2016).

<sup>53</sup> Wawancara dengan Zaelous Siput Lokasari pada 1 Desember 2016. Pernyataannya ini juga dia sampaikan pada saat dirinya bertemu Sultan pada Oktober 2016.

politik. Melalui politik itu, mereka hendak memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara secara penuh.

## **B.2. Bagaimana bentuk-bentuk peran politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta?**

Dalam sejarahnya partisipasi politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta sudah berlangsung lama semenjak era pra kemerdekaan. Peran politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta ini merupakan bagian dari gerakan politik warga Tionghoa pada umumnya di Indonesia. Termasuk berdirinya PITI di Yogyakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berdirinya PITI di Indonesia.

Dalam sejarahnya, partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa telah berlangsung di era kolonial. Di era kolonial Belanda misalnya berdiri sebuah organisasi Tionghoa bernama Sun Yat Sen. Berdirinya organisasi konon dalam rangka untuk melawan politik diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan bertempat tinggal.<sup>54</sup>

Di Yogyakarta, sejak abad ke 1819/, warga Tionghoa sudah ada yang menjadi pejabat, termasuk menjadi bupati. Seperti yang dijelaskan oleh Rezza Maulana bahwa jejak yang paling menonjol politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta ada pada sosok Tan Jin Sing (1760-1831-). Ia merupakan seorang kapiten Tionghoa yang diangkat sebagai bupati Yogyakarta oleh Sultan HB III atas jasanya dalam membantu mendapatkan takhta dari

---

<sup>54</sup> <http://www.ujungpandangekspres.com/> (akses: 15/12/2016)

Sultan HB II.<sup>55</sup> Sebelum dirinya ditetapkan sebagai bupati, dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat, Tan Jin Sing masuk Islam bersama istrinya atas bimbingan Kyai Reksonegoro.<sup>56</sup> Dalam kisah ini juga terdapat sebuah informasi yang menarik bahwa Kyai Reksonegoro dan istrinya memantapkan Tan Jin Sing memeluk Islam menjelang pengangkatannya sebagai bupati di Yogyakarta.<sup>57</sup> Paling tidak ada dua alasan yang digunakan Kyai Reksonegoro dan istrinya, untuk memantapkan Tan Jin Sing memeluk Islam pertama, karena kebanyakan bangsawan Jawa (Bupati) adalah orang Muslim, kemudian yang kedua, menjadi Muslim bagi seorang Tionghoa bukanlah hal aneh, karena dalam sejarah ada tokoh Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang Tionghoa Muslim asli dari negeri China.<sup>58</sup>

Kemudian pada era selanjutnya, yaitu pada era masa revolusi RI, diskriminasi dan segregasi warga Tionghoa tampak pada berita politik yang dimuat dalam media massa seperti dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa, namun nama mereka tidak banyak dicatat dan diberitakan. Salah seorang yang dikenali ialah Tony Wen, yaitu orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Rezza Maulana, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta*.....hlm.121

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> T.S. Werdoyo, *Tan Jin Sing: Dari Kapiten Cina Sampai Bupati Yogyakarta*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 5.

<sup>59</sup> Sari Riantika Damayanti, *Partisipasi Polirik Warga Tionghoa-Indonesia Pada Perodesasi Era Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001): Studi Atas Surat Kabar Guo Ji Ri Bao*, (Makalah) (akses:15/12/2016)



Di era kolonialisme, dalam catatan Kwee Tek Hoai, terbagi tiga kelompok Tionghoa di Indonesia pertama, Sin Po, kelompok yang berorientasi ke Tiongkok dan menganjurkan Hoa Kiao memertahankan identitas sebagai warga Tiongkok dan menolak menjadi Nederlands Onderdean, Kawula negara Belanda. Kemudian kedua, Chung Hua Hwee (CHH), didirikan 8 April 1928. Secara politik, CHH berorientasi kepada pemerintahan Belanda dengan pemikiran menjadi Nederlands Onderdean. Sehingga kelompok ini merupakan kelompok Tionghoa di Indonesia yang pro Belanda. Ketiga, Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan pada 25 September 1932 oleh Liem Koen Hian, Ong Liang Kok. PTI berorientasi kepada gerakan nasionalisme Indonesia.<sup>60</sup> Dari sini terlihat bagaimana semenjak era kolonialisme sudah banyak warga Tionghoa yang terlibat di dalam politik, termasuk di Yogyakarta.

Selanjutnya pada Orde Lama, beberapa warga Tionghoa juga banyak yang terlibat dalam politik. Di antara mereka ada yang menjadi menteri Republik Indonesia seperti Oei Tjoe Tat, Ong Eng Die, Siauw Giok Tjhan dan yang lainnya. Bahkan Oei Tjoe Tat pernah diangkat sebagai salah satu “tangan kanan” Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora.<sup>61</sup> Pada masa ini hubungan Ir. Soekarno dengan masyarakat Tionghoa Indonesia lumayan bagus. Namun pada Orde Lama ini juga Soekarno membuat kebijakan politik yang diskriminatif seperti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibukota provinsi dan kabupaten. Kebijakan diskriminatif di era Orde

---

<sup>60</sup> Wang Xian Jun, *Orang-Orang China yang mempengaruhi Kemerdekaan Indonesia*, (Yogyakarta: PUSTAKA SOLOMON, tth)

<sup>61</sup> Sari Riantika Damayanti, *Partisipasi Politik Warga Tionghoa-Indonesia Pada Perodesasi Era Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001): Studi Atas Surat Kabar Guo Ji Ri Bao*, (Makalah) (akses:15/12/2016)

lama ini juga membuat Pramoedya Ananta Toer mengkritiknya lewat sebuah bukunya *Hoakiau di Indonesia* yang membuat Pram dijemput ke penjara oleh Orde Lama karena dianggap membela China.

Di masa Orde Lama, ada seorang tokoh Tionghoa di Yogyakarta yang turut berpartisipasi dalam politik Indonesia dan ikut serta dalam pemerintahan Indonesia, yaitu Yap Tjwan Bing. Yap Tjwan Bing yang lahir di Slompretan, Solo, pada 31 Oktober 1910 ini ketika RI hendak berdiri, ia bergiat dalam gerakan pemuda mewakili golongan peranakan Tionghoa. Ia sering aktif menghadiri rapat pembentukan Gerakan Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru.<sup>62</sup> Ia juga menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Dan pada saat UUD 1945 akan disahkan Yap Tjwan Bing turut menghadiri pengesahan itu sebagai perwakilan etnis Tionghoa.<sup>63</sup>

Ia bergabung dengan PNI dan oleh KNIP di Yogyakarta dan diangkat menjadi anggota DPR-RIS sebagai wakil etnis Tionghoa bersama Siauw Giok Tjhan, kemudian setelah RIS dibubarkan ia diangkat menjadi anggota DPR-RI Kesatuan sebagai wakil PNI.<sup>64</sup> Pada 18 Agustus 1954 saat menjadi anggota PPKI ia digantikan Tony wen namun kelak kemudian ia kembali lagi menjadi anggota DPR Gotong Royong RI.<sup>65</sup> Dari potret Yap Tjwan Bing inilah warga Tionghoa terlihat menunjukkan peran politiknya di Yogyakarta, di era Orde Lama.

Kemudian di era pemerintahan Orde Baru, peran politik warga Tionghoa tidak begitu mencolok. Sebab aktivitas politik warga Tionghoa

---

<sup>62</sup> Wang Xian Jun, *Orang-Orang China yang mempengaruhi Kemerdekaan Indonesia*.

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

banyak dibatasi oleh rezim Orde Baru. Penguasa Orde Baru, Soeharto (1966-1998-) saat itu mempunyai beberapa kebijakan yang secara eksplisit memblokir peran politik Tionghoa. Tentu saja kebijakan Soeharto ini juga berdampak pada peran politik warga Tionghoa Muslim di Yogyakarta. Pada masa Orde Baru inilah, tepatnya pada 1970-an, PITI Yogyakarta berdiri atas dukungan tokoh-tokoh Muslim di Yogyakarta, baik tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Nahdlatul Ulama.

Gerakan PITI DIY pertama kali berdiri adalah murni dakwah dan kegiatan sosial. Organisasi yang baru berdiri di Yogyakarta ini menunjukkan geliatnya yang tinggi yang ditunjukkan oleh tingginya semangat dari para pengurusnya. Ketua pertamanya, H. Iksan Budi Santoso dan Sekretaris Ahmad Sutanto secara terbuka mengakui dirinya sebagai Tionghoa Muslim, sehingga para tokoh Tionghoa ini sering diundang untuk menjadi penceramah atau ustaz dalam pengajian di berbagai tempat seperti Kulonprogo dan Klaten. Bahkan setiap Ramadan, jadwal mereka menjadi penceramah sangat padat.<sup>66</sup>

Dalam masa ini, orientasi PITI Yogyakarta juga belum begitu jelas, selain hanya untuk melakukan dakwah, yang disebabkan salah satunya oleh persoalan politik saat itu. Dalam analisisnya analisis Rezza Maulana, pada masa Orde Baru tampaknya usaha kolektif berupa organisasi (PITI) menjadi alat untuk mewujudkan cara masing-masing pihak yang berbeda dan belum ada titik temunya, sehingga organisasi terlihat pontang-panting ke sana-kemari. Satu pihak, kata Maulana, sebagian pengurus PITI hendak meluruskan jalan sebagai organisasi dakwah dengan ciri karakternya yang unik (etnisitas), namun di pihak lain sebagian para eksponennya hendak

---

<sup>66</sup> Rezza Maulana, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta.....*hlm.123-124

menjadikan PITI sebagai media dakwah tanpa menonjolkan keunikannya serta menyerasikan dengan program pemerintah dalam hal pembauran.<sup>67</sup>

Salah satu bentuk pembatasan aktivitas politik dan termasuk jenis diskriminasi pemerintah Orde Baru yang ditujukan kepada warga Tionghoa adalah Pada dibuatnya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, lebih populer disebut SBKRI, yang ditujukan kepada kelompok etnik Tionghoa Indonesia berserta keturunan-keturunannya. SBKRI adalah dokumen yang membuktikan bahwa pemilikinya merupakan warganegara Republik Indonesia.

SBKRI terutamanya hanya diberikan kepada keturunan Tionghoa. Hal ini menunjukkan bahwa sttaus warga Tionghoa sebagai warga negara Indonesia saat itu dianggap belum sepenuhnya 'sah'. Artinya dengan dikeluarkannya SBKRI ini secara implisit memposisikan status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa «masih dipertanyakan» dari perspektif undang-undang kewarganegaraan. Karena itulah wajar kalau di dalam politik selama Orde Baru, warga Tionghoa lebih banyak dibatasi.

Sehingga sebagai gantinya, aktivitas warga Tionghoa lebih banyak ke sektor ekonomi. Mereka lebih banyak berbisnis. Karenanya wajar, kalau mereka banyak yang menguasai lahan ekonomi, mulai dari pakaian hingga bahan-bahan elektronik. Bahkan toko elektronik di Yogyakarta kebanyakan pemilikinya adalah warga Tionghoa. Orang Tionghoa di Yogyakarta banyak berdagang dan menjual segala hal yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak. Toko-toko di sepanjang jalan utama Yogyakarta, termasuk di Malioboro, dari yang kecil maupun yang besar sebagian besar merupakan milik orang Tionghoa. Bahkan toko-toko itu sebagiannya juga menjadi tempat tinggal mereka. Sebagai contoh area

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm.125

yang berada di Kranggan yakni pasar Kranggan, Malioboro, Ketandan, Bekalan dan Jl. Mataram, kebanyakan pemilik toko-toko di kawasan ini adalah warga Tionghoa.<sup>68</sup>

Hingga pada akhirnya, pemukiman warga Tionghoa di Yogyakarta, dan mungkin juga di daerah-daerah lain, sangat identik dengan area bisnis. Di Yogyakarta sendiri, hal ini bisa dilihat area sekitar Kranggan yang pemukimannya dekat dengan pasar Kranggan dan juga kawasan Ketandan, yang lebih dekat dengan pasar Beringharjo, sebuah pasar tradisional terbesar di Yogyakarta. Selanjutnya, perkembangan pemukiman orang Tionghoa juga semakin meluas. Hal ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya komunitas Tionghoa di Yogyakarta. Perluasan area pemukiman warga Tionghoa di Yogyakarta ini sejalan dengan pertumbuhan kawasan yang strategis untuk berbisnis, di antaranya adalah kawasan yang terletak di Jl. Solo, Jl. Mataram, Jl. Parangtritis, sedangkan untuk di area kota bisa meliputi Jl. Magelang, yang berada di kawasan Sleman, Jln Bantul di kawasan Kab. Bantul.<sup>69</sup>

Warga Tionghoa yang beragama muslim juga sama. Mereka lebih banyak berbisnis, sebagai akibat dari kebijakan Orde Baru yang membatasi warga Tionghoa di dalam politik dan pemerintahan. Mereka umumnya membuka usaha di rumahnya sendiri seperti dengan jualan barang kebutuhan pokok sehari-hari (sembako), busana, toko kelontong,<sup>70</sup> toko

---

<sup>68</sup> Hal ini diketahui berdasarkan observasi pada 2 Desember 2016

<sup>69</sup> Berdasarkan observasi pada 2 Desember 2016

<sup>70</sup> Data ini diperoleh dalam sebuah Wawancara yang pernah penulis lakukan dengan dengan Ibu Linda Lestari di rumahnya, 4 Januari 2013,

bangunan sampai onderdil motor .Ada juga yang berusaha di bidang keuangan seperti di BPR.<sup>71</sup>

Warga Tionghoa yang masuk Islam, terutama paska reformasi, kondisi perekonomian mereka mengalami peningkatan, karena pangsa pasar mereka lebih luas. Selain itu karena terjalinnya persaudaraan antar umat Islam yang relatif kuat, membuat mereka mempunyai akses jaringan bisnis yang luas. Salah satu contohnya toko ABC yang terletak di jalan Kyai Mojo. Toko ini nampak semakin berkembang. Para pelanggan yang belanja di situ juga semakin ramai dan mendapatkan pelayanan yang sama. Selain usaha toko, juga ada yang bergerak di bidang usaha makanan, pemotretan dan lain lain.<sup>72</sup> Jadi di masa Orde Baru, dan tentu hingga sekarang, kebanyakan warga Tionghoa bergerak di bidang bisnis, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Hal ini termasuk yang ada di Yogyakarta.

Sebab, hanya di ranah ekonomi yang memungkinkan mereka bisa leluasa bergerak. Untuk di dunia politik, pemerintahan, budaya dan sebagainya, kemungkinan mereka untuk berpartisipasi sangat kecil. Di era Orde Baru tentu kecil sekali warga Tionghoa yang bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil atau DPR. Karena itu mereka lebih sibuk berbisnis.

Tapi itu dulu ketika di era Orde Baru. Ketika era Reformasi muncul, yang memberikan angin kebebasan, warga Tionghoa di Yogyakarta, dan juga di Indonesia, bukan hanya berbisnis. Tetapi mereka mulai menyerbu ke berbagai sektor, termasuk politik. Meski begitu tentu saja masih terdapat beberapa kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun

---

<sup>71</sup> Keterangan ini diperoleh dalam wawancara dengan Pak Bambang yang pernah penulis lakukan di rumahnya, 4 Januari 2013,

<sup>72</sup> Keterangan ini penulis peroleh dalam sebuah wawancara dengan Bapak Maꦗꦫꦸꦱ Siregar di rumahnya, 11 Desember 2012

daerah yang mendiskriminasi mereka, salah satu contohnya adalah soal kepemilikan tanah di Yogyakarta sebagaimana yang sudah disinggung di atas. Namun ruang gerak warga Tionghoa di Yogyakarta, termasuk yang Muslim, semakin terbuka dan luas. Mereka sekarang banyak yang terjun ke dunia politik; banyak yang mulai menjadi anggota DPR, menjadi pengacara dan sebagainya. Singkatnya ruang gerak mereka tidak hanya di ranah ekonomi, melainkan di berbagai ranah yang lain, termasuk ranah politik.

Karenanya, sebagaimana yang dilansir di dalam <http://www.pikiran-rakyat.com> (112010/05/) Masyarakat Muslim Tionghoa Indonesia mengalami kemajuan dari segi akomodasi politik, budaya dan peran lain dalam masyarakat sejak masa reformasi. Hal ini juga diungkapkan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Tulus Warsito bahwa kondisi mereka berbeda sama sekali dengan era Orde Baru. Itu merupakan keberhasilan masyarakat Tionghoa dalam memerjuangkan hak-haknya.

Menurutnya eksistensi mereka diakui melalui libur nasional Tahun Baru Cina, memiliki peluang bebas untuk mengaplikasikan budaya nenek moyang, aktualisasi politik, menggunakan bahasa Mandarin, dan pengakuan bidang bisnis. Dia juga menegaskan Studi Cina saat ini penting dilembagakan di universitas manapun. Proses migrasi Muslim Tionghoa di Indonesia misalnya, itu misteri yang penting dikaji. Masalah ini juga dibahas dalam forum “Indonesian Chinese Muslim: Problems and Prospects”.

Selain itu, jumlah Muslim Tionghoa di Yogyakarta sekarang juga bertambah. Hal ini diungkapkan oleh Budi Setyagraha, mantan ketua PITI dan anggota DPRD Yogyakarta dari PAN. Menurutnya setelah dirinya

masuk Islam, maka banyak warga keturunan Tionghoa yang justru dekat dengannya dan ikut masuk Islam. Hal ini sekaligus menunjukkan dirinya merupakan orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat Tionghoa.

Dalam pemaparannya, bila pada tahun 1983 hanya ada tiga atau empat orang keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam, maka sekarang ini jumlah Muslim Tionghoa di Yogyakarta terus bertambah.<sup>73</sup> Tahun ini, anggota PITI berjumlah lebih dari 200 orang, yang menunjukkan Muslim Tionghoa sekarang sudah tidak malu lagi memeluk Islam.<sup>74</sup> Secara psikologis, kata Budi, mereka sudah berani menonjolkan dirinya dan bangga sebagai pemeluk agama Islam. Menurut dia, selama ini, pendekatan dakwah bagi keturunan Tionghoa seringkali keliru, di mana orang Tionghoa sering ‘dicina-cinakan’, padahal bagi orang Tionghoa, kata Cina itu konotasinya negatif.<sup>75</sup>

Selain itu, di era Reformasi ini, para warga Tionghoa Yogyakarta juga bisa merayakan kebudayaan Tiongkok, di antaranya adalah perayaan Imlek, Barongsai dan sebagainya, yang di era Orde Baru, perayaan-perayaan tradisi Tiongkok ini tidak mungkin dilakukan. Bagi Tionghoa Muslim di Yogyakarta, ketika merayakan Tahun Baru Imlek pada 2005, perayaan itu merupakan yang ketiga kalinya dilakukan secara terbuka. Pertama kali perayaan Imlek oleh warga Tionghoa Muslim terjadi pada Februari 2003 dan diselenggarakan di Masjid Syuhada, Kotabaru, Yogyakarta.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Budi Setyagraha, pada 2 Desember 2016

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Iman Astri Okta Ayuana, “Organisasi dan Kegiatan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Yogyakarta”, Tugas Akhir pada Program Studi D-3 Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007, hlm. 39.



Perayaan budaya Tionggok, seperti Imlek secara masif ini, secara politik merupakan faktor yang membuat warga Tionghoa Muslim maupun non-Muslim, termasuk di Yogyakarta, semakin eksis. Sebab pertunjukan budaya seperti itu juga merupakan sebuah strategi untuk memperteguh eksistensi sebuah kelompok dalam masyarakat. Semakin produk-produk budaya atau tradisi itu diterima di dalam masyarakat secara massif, maka pertanda keberadaan kelompok pemilik tradisi tersebut juga semakin diterima dan bisa melebur dalam arus besar masyarakat.

Dengan memainkan strategi kebudayaan itu, secara politik, warga Tionghoa di Yogyakarta, berusaha untuk bisa diterima seutuhnya menjadi warga negara Indonesia. Sehingga konsekuensinya, berbagai sistem dan kebijakan yang diskriminatif terhadap diri mereka bisa dihapuskan. Hingga saat ini istilah *pribumi* dan *non-pribumi* masih berlaku kuat di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Perbedaan ini membawa konsekuensi yang signifikan bagi kehidupan warga negara Indonesia.

Pihak atau kelompok yang dimasukkan ke dalam *non-pribumi* hak-haknya belum bisa dipenuhi secara penuh. Kelompok yang disebut dengan *non-pribumi* ini dalam kenyataannya masih dimarginalkan dan dibatasi hak-haknya sebagai warga negara. Orang Tionghoa, merupakan salah satu kelompok di Indonesia yang masuk *non-pribumi*, karenanya hak-hak mereka masih didiskriminasikan. Hal ini tentu berbeda dengan warga yang diklaim sebagai pribumi, warga Indonesia asli. Meski secara ekonomi, kebanyakan mereka justru kalah dengan warga Tionghoa yang non-pribumi, namun hak-hak politik mereka sebagai warga negara terpenuhi. Seperti mereka bisa mempunyai hak milik tanah. Hal ini seperti yang terjadi di Yogyakarta.

Karena itu perbedaan antara *pribumi* versus *non-pribumi* inilah yang sekarang juga mulai digugat oleh kelompok masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. mereka menghendaki supaya oposisi biner antara *pribumi* versus *non-pribumi* itu dihapuskan dan dileburkan menjadi satu entitas politik: WNI (warga negara Indonesia). Jadi warga Tionghoa di Yogyakarta menghendaki bahwa dalam konteks kewarganegaraan yang ada hanya satu : WNI dan bukannya pribumi versus non-pribumi.

Hal itu seperti dikatakan oleh ketua Granad, Willie Sebastian ketika dirinya dan teman-temannya menuntut tentang diskriminasi kepemilikan tanah di Yogyakarta: “«Saya mau tanya, apa ada WNI non pribumi? WNI ya WNI. Ini diskriminasi, padahal kita sudah punya UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”<sup>77</sup> begitulah kata Sebastian saat diwawancarai terkait dengan larangan kepemilikan tanah bagi warga Tionghoa di Yogyakarta.

Karena itulah untuk mengatasi persolan-persoalan diskriminasi politik yang menimpa mereka, warga Tionghoa di Yogyakarta, selain masuk ke dalam politik praksis, mereka juga memainkan strategi kebudayaan, dengan tujuan untuk menghapus politik sektarianisme dan diskriminasi tersebut. Melalui penyebaran budaya-budaya Tiongkok di Indonesia, dan di Yogyakarta tersebut diharapkan kebudayaan dan tradisi Tiongkok tersebut bisa melebur ke dalam sistem kebudayaan Indonesia. Ketika budaya-budaya Tionghoa ini berhasil menjadi bagian integral dari kebudayaan nasional, maka status kewarganegaraan warga Tionghoa di Indonesia juga bisa diakui secara total, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan pembedaan politik berdasarkan etnis atau golongan.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Willie Sebastian pada 5 Desember 2016

Sebagai salah satu bentuk strategi kebudayaan warga Tionghoa di Yogyakarta adalah, selain rutin merayakan Imlek di setiap tahunnya, mereka sekarang telah membentuk seremoni budaya yang bernama Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY). Pada tahun 2015 yang lalu misalnya, kegiatan ini telah digelar dari 15- Maret di kampung Pecinan Ketandan, Yogyakarta. Perhelatan ini mengangkat tema, “Merajut Budaya, Merenda Kebersamaan”, yang mencerminkan bahwa budaya Tiongkok juga seperti Indonesia: mempunyai 1001 macam budaya.<sup>78</sup> Pekan Budaya Tionghoa ini sendiri sebenarnya sudah diselenggarakan sejak 2006 seiring era reformasi di Indonesia. Festival yang digelar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ini merupakan upaya mempertahankan identitas Kampung Pecinan Ketandan.<sup>79</sup>

Festival ini dirancang selayaknya Jogja Java Carnival. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, PBTY dimeriahkan oleh pameran budaya, atraksi liong samsi, naga barongsai, wayang potehi, karnaval kirab budaya, jogja dragon festival, lomba karaoke, panggung hiburan hingga bazaar yang menjual pernak-pernik Imlek.

Kampung Ketandan merupakan saksi sejarah akulturasi antara budaya Tionghoa, keraton dan warga Yogyakarta.<sup>80</sup> Letaknya di pusat kota,

---

<sup>78</sup> travel.kompas.com (akses:16/12/2016)

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Dalam sebuah observasi pada 6 Desember 2016 bisa dijumpai bahwa di kawasan Kampung Ketandan ini kita bisa melihat bentuk-bentuk bangunan dan seni arsitektur Tionghoa yang identik dengan rumah tingkat dengan berbagai ornamen Tiongkok. Bangunan-bangunan ini umumnya didominasi warna merah yang dipadu dengan warna kuning. Di dalam bangunan itu juga dihiasi dengan ornamen-ornamen khas Tiongkok seperti gambar Naga dan tulisan-tulisan dengan menggunakan abjad Tiongkok. Susunan rumah atau bangunan tersebut kebanyakan dibangun memanjang ke belakang. Rumah-rumah inilah yang sekaligus dijadikan sebagai toko bagi para

tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Jalan Suryatmajan, Jalan Suryotomo dan Jalan Los Pasar Beringharjo. Seseorang bisa dengan mudah mengunjungi kampung Pecinan ini karena letaknya yang strategis di tengah kota, yaitu di sisi selatan kawasan Malioboro.

Sejak 200 tahun lalu daerah ini menjadi tempat tinggal dan tempat mencari nafkah bagi masyarakat Tionghoa sehingga diakui sebagai kawasan Pecinan di Yogyakarta. Arsitekturnya didominasi nuansa tempo dulu dengan ciri khas rumah-rumah memanjang ke belakang dan digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus toko.<sup>81</sup>

Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai pedagang emas dan permata, toko kelontong, toko herbal, kuliner dan penyedia berbagai kebutuhan pokok. Menjelang tahun 1950-an, hampir 90 persen penduduk beralih menjadi pedagang emas.<sup>82</sup>

Jadi terkait dengan persoalan di atas tentang bagaimana bentuk-bentuk peran politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta, berdasarkan

---

warga Tionghoa yang umumnya memang pengusaha. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar warga Tionghoa di kampung pecinan ini berprofesi sebagai pedagang emas dan permata. Apabila kita berjalan ke kawasan Pecinan yang terletak di seberang Pasar Beringharjo, maka akan dijumpai sebuah toko obat Tiongkok yang sudah cukup lama berdiri, yaitu 'Toko Obat Bah Gemuk'. Di toko obat inilah banyak dijual ramuan obat dan jamu khas Tiongkok. Obat dna herbal yang dijual di toko ini kemanjurannya sudah terbukti, sehingga banyak orang yang membeli obat ke toko ini. Kemudian, apabila kita berjalan sampai di kawasan Lor Pasar, kita akan bisa menjumpai kios-kios tradisional yang menjual berbagai kebutuhan, mulai dari elektronik, peralatan menjahit dan aksesoris pakaian, peralatan memasak hingga perhiasan emas. Kawasan ini sejak lama telah dikenal masyarakat Yogyakarta sebagai salah satu tempat mendapatkan kebutuhan dengan harganya yang murah. Selain menjual barang-barang baru, kios-kios itu juga banyak menjual barang bekas.

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*

penjelasan di atas bisa diketahui bahwa peran politik masyarakat Tionghoa di Yogyakarta, termasuk yang Muslim telah berlangsung selama yaitu sejak Tan Jin Sing (1760-1831-), yang ditunjuk oleh HB III sebagai bupati Yogyakarta. kemudian di era kolonialisme peran politik warga Tionghoa di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, terbagi menjadi tiga kelompok yang mempunyai orientasi berbeda: pertama, Sin Po, kelompok yang berorientasi ke Tiongkok dan menganjurkan Hoa Kiao untuk melestarikan identitas sebagai warga Tiongkok dan menolak menjadi Nederlands Onderdean, Kawula negara Belanda. Kemudian kedua, Chung Hua Hwee (CHH), didirikan 8 April 1928, yang secara politik, berorientasi kepada pemerintahan Belanda dengan pemikiran menjadi Nederlands Onderdean. Dan ketiga, Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan pada 25 September 1932 oleh Liem Koen Hian, Ong Liang Kok, yang berorientasi pada kepada gerakan nasionalisme Indonesia.

Setelah itu, memasuki era Orde Lama, warga Tionghoa juga banyak yang masuk birokrasi, di antara mereka ada yang diangkat menjadi menteri oleh Soekarno. Namun rezim Orde Lama juga membuat kebijakan yang diskriminatif, seperti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang warga Tionghoa di Indonesia berjualan eceran di daerah yang ada di luar ibukota provinsi dan kabupaten. Setelah itu di era Orde Baru, diskriminasi terhadap warga Tionghoa semakin ketat, bukan hanya di dalam politik tetapi juga di ranah kebudayaan. Satu-satunya ranah yang bebas diakses oleh warga Tionghoa di era Orde Baru adalah ranah ekonomi. Karenanya, kebanyakan warga Tionghoa di era Orde Baru banyak yang menekuni dunia bisnis. Di era Orde Baru ini pula, PITI Yogyakarta didirikan tepatnya pada 1970-an.

Hingga pada akhirnya lahirlah er Reformasi. Di era ini kran demokrasi dan kebebasan terbuka lebar. Hal ini dimanfaatkan oleh Tionghoa untuk

berpartisipasi di ranah apa saja, bukan hanya di ranah ekonomi, tetapi juga politik dan kebudayaan. Peran-peran politik di berbagai sektor ini dianggap penting oleh warga Tionghoa, karena untuk memperjuangkan nasib mereka yang secara politik masih didiskriminasikan.

Karena itulah warga Tionghoa sekarang di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, termasuk yang beragama Islam, banyak aktif di politik. Di antara mereka ada yang menjadi anggota DPRD. Begitu juga mereka semakin aktif menggelar budaya-budaya dan tradisi Tionghoa, sebagai upaya untuk menghapus diskriminasi antara warga pribumi versus non-pribumi.

### **B.3. Bagaimana preferensi pilihan politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta?**

Sejak lahirnya Reformasi 1998, ada banyak perkumpulan warga Tionghoa di Yogyakarta. Seperti dikatakan Rezza Maulana bahwa paling tidak sepuluh organisasi lokal atau peguyuban orang Tionghoa dengan berbagai latar belakang, antara lain Paguyuban Bhakti Putera, Perhimpunan Warga Cantonese Yogyakarta (Perwacy), Paguyuban Budi Abadi (Hoo Hap Hwee), Paguyuban Bhakti Loka, Paguyuban Hakka Yogyakarta, Paguyuban Fu Qing, Perhimpunan Indonesia- Tionghoa (INTI) Pengurus Daerah DI Yogyakarta, Perkumpulan Urusan Kematian Jogjakarta (PUKJ), Paguyuban Alumni Sekolah Tionghoa Indonesia (PASTI), dan Yayasan Persaudaraan Masyarakat Jogjakarta (YPMJ). Sedangkan organisasi sosial umum yang juga banyak orang Tionghoa terlibat di dalamnya antara lain Hash (bidang olahraga), Paguyuban Mitra Masyarakat Yogyakarta (Pamitra), Rotary Internasional, Lion Club, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan Paguyuban Pedagang Malioboro (PPM).

Sebenarnya sejak di era kolonialisme, aspirasi politik warga Tionghoa tidak pernah tunggal. Para tokoh Tionghoa, termasuk yang Muslim, tersebar di berbagai partai politik, termasuk di era sekarang. Seperti yang diulas oleh Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (2005) bahwa memasuki abad ke-20, ketika ide tentang nasionalisme menyeruak ke permukaan, warga Tionghoa muslim tak pernah menjadi kelompok yang eksklusif, tetapi mereka justru lebih membaur atau berasimilasi dengan gerakan-gerakan Islam yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini, Trisnanto menyebutkan sejumlah tokoh Tionghoa, yang di antaranya adalah tokoh Tionghoa yang ada di Bengkulu yang bernama Abdul Karim Oei Tjing Hien. Ia merupakan seorang tokoh Muhammadiyah yang dekat dengan Bung Karno. Selain di Muhammadiyah, para tokoh Tionghoa Muslim juga ada di Masyumi, yaitu Oei Tjing Hien. Selain itu tokoh Tionghoa Muslim lainnya, yakni Tan Kiem Liong bergabung dengan NU dan menjadi anggota DPR dari partai NU (1959-1960-). Bahkan Tan Kiem Liong pernah menjadi Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan.

Pada era berikutnya, masih menurut Trisnanto, ada tokoh Tionghoa Muslim, Junus Jahja (Lauw Chuan To), yang terlibat dalam gerakan asimilasi dan termasuk pendiri Bakom PKB. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Bukan hanya di politik. Warga Tionghoa di dunia keagamaan dan dakwah juga banyak. Peran Tionghoa muslim orang per orang bergeser kepada peran politik yang lebih bersifat elitis, namun itu pun tidak banyak jumlahnya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> A M Adhy Trisnanto, *Refleksi Menyambut Muswil PITI Jawa Tengah Quo Vadis Tionghoa Muslim ?*, <http://www.suaramerdeka.com/> (2/03/2005)

Dalam hal praktik keagamaan, Muslim Tionghoa tidak bisa lepas dari tradisi keislaman yang ada di Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya untuk memperlancar politik asimilasi warga Tionghoa dengan warga pribumi. Lewat program asimilasi yang dicanangkan Orde Baru, kata Rezza Maulana, garis tradisi keislaman orang Tionghoa diarahkan pada tradisi keislaman lokal sesuai dengan tempat tinggal mereka. Misalnya, Tionghoa Muslim yang tinggal di Jawa menyerap Islam ala NU atau Muhammadiyah.<sup>84</sup>

PITI sendiri, yang dalam visinya mengusung slogan yang lebih universal yakni menyebarkan *Islam Rahmatallil aalamiin*, namun, dalam praktiknya tetap tidak bisa menghindar dari organisasi-organisasi keagamaan lokal dan partai politik di daerah. Misalnya di Yogyakarta, warga Tionghoa Muslim, tentu saja secara individu, cenderung bergabung dengan persyarikatan Muhammadiyah dan secara politik lebih berafiliasi dengan PAN, meski tidak bisa dipungkiri bahwa rujukan pada organisasi dan parpol yang lain juga ada.<sup>85</sup>

Sementara itu, menurut A. Syaukanie Ong, Pengurus DPW PITI Jatim, PITI Jawa Timur justru lebih dekat dengan tokoh-tokoh NU Jatim misalnya HMY Bambang Sujanto, lebih kenal dan dekat dengan Gus Dur serta tokoh-tokoh NU Jatim dan sebaliknya kurang begitu dekat dengan Amien Rais atau tokoh-tokoh Muhammadiyah Jatim.<sup>86</sup>

Secara umum, suara warga Muslim Tionghoa di Yogyakarta, tidak diarahkan pada satu partai politik, melainkan ke beragam partai, seperti

---

<sup>84</sup> Rezza Maulana, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta.....* hlm.131

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm.130

<sup>86</sup> A. Syaukanie Ong, "Tanggapan Untuk Djoko Susilo: Amin Rais, Muhammadiyah dan WNI Keturunan Jawa", Pos, Senin Legi, 2 Maret 1998



Partai Demokrat, PAN, PDI-P, dan PKB. Dengan konstalasi politik seperti ini, maka pada 2009 yang lalu, sekitar dua ratus etnis Tionghoa mencalonkan diri sebagai DPR atau DPRD lewat berbagai parpol. Salah satunya, mantan ketua PITI Budi Setyagraha yang pernah terpilih sebagai anggota DPRD Yogyakarta (2004-2009-).

Dalam sebuah tulisannya “Masjid Cheng Hoo: Pribumisasi Budaya Cina dan Distansiasi dari Hegemoni Politik Negara di Indonesia”, Ahmad Muzakki memaparkan bahwa kehidupan masyarakat muslim Tionghoa di Surabaya lebih terbuka tanpa ada hegemoni negara. Keterbukaan itu, misalnya, bisa disaksikan dalam gaya arsitektur Masjid Cheng Hoo yang telah mereka bangun.

Di Surabaya, lanjut Muzakki, warga Tionghoa muslim berafiliasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, terutama NU dan Muhammadiyah, untuk memudahkan mereka menyalurkan aspirasi. Hal ini menunjukkan PITI sebagai organisasi keagamaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan organisasi-organisasi setempat, termasuk juga parpol. Hal inilah yang juga dialami oleh PITI Yogyakarta. Sebagai organisasi yang mewadahi warga Tionghoa Muslim di Yogyakarta, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari pergumulan kelompok-kelompok Islam yang ada di Yogyakarta, baik Muhammadiyah, NU dan organisasi-organisasi keislaman lainnya.

Dalam percaturan politik, warga Muslim Tionghoa di Yogyakarta hingga kini masih belum mampu mewakili dirinya. Hal ini karena jumlah mereka yang minoritas dan suara kecil mereka ini, disalurkan ke berbagai partai politik yang berbeda, dan bukan menggumpal ke satu partai politik. Akibatnya suara warga Muslim Tionghoa hanya dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang ada untuk mendulang suara. Kebanyakan

Caleg Tionghoa masih awam dengan dunia politik Indonesia dan masih belum siap untuk terjun ke gelanggang politik.

Maklum, selama berpuluh-puluh tahun ruang gerak politik mereka sangat dibatasi. Dalam menghadapi pemilu Presiden dan Wakil Presiden pun, etnis Tionghoa banyak yang masih merasa kebingungan dalam menyalurkan aspirasinya. Alasan mereka adalah bahwa mereka memandang tidak ada pasangan yang cocok yang bisa mewakili aspirasi mereka. Meski demikian, ada juga sejumlah orang Tionghoa, termasuk Tionghoa Muslim, yang terjun ke dunia politik.

Namun karena suara mereka yang terhitung kecil dan tersebar ke berbagai politik, menjadikan kegagalan para warga Tionghoa yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Hal seperti ini terjadi di Yogyakarta juga. Misalnya Budi Setyagraha yang terpilih menjadi anggota DPRD 20042009-, tapi gagal menjadi anggota leguslatif pada pemilu berikutnya. Hal ini karena suara warga Tionghoa, baik yang muslim maupun yang non-Muslim tidak bisa disatukan ke dalam satu partai.

Suara warga Muslim Tionghoa tidak sepenuhnya bisa disatukan ke dalam PAN, partai yang dijadikan Budi Setyagraha mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Yogyakarta. Seandainya seluruh warga Tionghoa DIY beragama Islam maupun non muslim pun bersatu untuk memilih Budi, itu pun saja tidak cukup, karena jumlahnya jauh besar dengan jumlah warga pribumi Yogyakarta.<sup>87</sup>

Dari fenomena tersebut kemudian bisa diketahui bahwa Budi Setyagraha yang pernah berhasil melenggang ke DPRD Yogyakarta sebenarnya bukan hanya didukung oleh warga Tionghoa Muslim,

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Ma'ruf Siregar di rumahnya, 11 Desember 2012

melainkan juga penduduk pribumi. Hal ini sekaligus menunjukkan semakin terkikisnya sekat antara pribumi dan non-pribumi.

### **Tionghoa Di Yogyakarta dan Persoalan Politik Etnik**

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa pergeseran politik Tionghoa di Yogyakarta, khususnya yang Muslim, sangat terkait dengan politik etnik yang ada di Indonesia. Ini merupakan sebuah konsekuensi Indonesia sebagai negara yang multi etnik, multi agama dan multi golongan. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara besar. Mampukah Indonesia mengakomodir berbagai etnis di dalamnya yang jumlahnya banyak dan beragam, termasuk etnik Tionghoa?.

Dalam konteks pergulatan etnisitas tersebut, Indonesia seolah di seolah dipaksa berusaha keras mereformulasikan secara sosiologis dalam merespon gejolak etnisitas dan perubahan sosial yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>88</sup> Sebab, politik identitas dan persoalan etnisitas hingga saat ini masih terus muncul, apalagi ketika isu ditarik ke dalam politik praktis. Dalam konteks inilah seringkali ikatan sosial dan solidaritas kebangsaan sering terkoyak akibat persoalan etnisitas dan identitas. Persoalan etnisitas ini semakin meruncing ketika dalam kenyataannya terjadi kesenjangan ekonomi, sehingga pihak-pihak tertentu mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbau SARA.

Kelompok etnik (*ethnic group*), menurut Eaton, merupakan setiap kelompok masyarakat yang berbeda dari ciri-ciri masyarakat pada umumnya dan cenderung bersifat rasialis. Para anggota kelompok etnik

---

<sup>88</sup> Sofyan Syaf, *Politik Etnik---Dinamika Politik Lokal di Kendari*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm.13

ini mempunyai rasa keterikatan dengan identitas kelompok, dan secara luas mereka merasa sebagai kelompok yang berbeda.<sup>89</sup> Dalam politik etnik ini, sejumlah kekuatan internal maupun eksternal cenderung menjaga kelompok etnik yang telah disatukan sedemikian rupa dan memperkuat perbedaan kultural mereka.<sup>90</sup>

Namun dalam konteks etnik Tionghoa di Indonesia ini, kalau dilihat dari pemaparan di atas, kelompok Tionghoa di Indonesia justru cenderung berusaha melebur dan membaaur dengan penduduk pribumi. Berbagai strategi politik dan budaya dilakukan dengan tujuan supaya mereka diterima sebagai bagian warga negara Indonesia seutuhnya. Sebab sebagai minoritas, ketika mereka eksklusif dan primordialis, justru akan semakin termarginalkan. Karenanya untuk menghapus segala bentuk kebijakan atau perlakuan yang diskriminatif dan sektarian, warga Tionghoa di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, berusaha membaaur dan melebur dengan warga pribumi. Meski juga harus dicatat bahwa mereka tetap mempertahankan tradisi dan berbagai bentuk budaya Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan semangat warga Tionghoa menampilkan dan menggelar budaya-budaya Tiongkok seperti Imlek dan barongsai di Indonesia.

Namun, usaha mereka menampilkan tradisi-tradisi Tiongkok di Indonesia itu bukan untuk meneguhkan perbedaannya dengan warga pribumi secara umum. Melainkan sebaliknya, mereka menampilkan budayanya itu dalam rangka untuk melakukan pembauran atau akulturasi; mereka menginginkan bahwa keberadaan mereka di Indonesia dengan segala bentuk tradisinya itu diterima sebagai warga Indonesia secara utuh. Karena itulah warga Muslim Tionghoa di Yogyakarta pada 2003 pernah

---

<sup>89</sup> John W. Eaton, "Ethnic Group" dalam *Encyclopedia Americana*, Vol.10 (New York: Americana Corporation, 1977), hlm.631

<sup>90</sup> *Ibid*

merayakan Imlek di Masjid Syuhada atas izin MUI setempat, setelah diperlihatkan sejumlah data dan fakta bahwa perayaan Imlek tidak terkait dengan agama tertentu (Kong Hu Cu).<sup>91</sup>

Pada 2007, PITI Yogyakarta bahkan menggagas dan sekaligus memprakarsai terselenggaranya Festival Imlek Bantul mulai 22 Februari hingga 4 Maret 2007. Festival Imlek 2007 ini diisi dengan beragam acara, di antaranya bedah buku *Menjadi Jawa* hasil karya Dr. Rustopo di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian pentas barongsai, pameran dan bazar, pengobatan gratis, dan lomba baca berita Mandarin. Seluruh kegiatan tersebut mengambil tempat di Pasar Seni Gabusan, Bantul. Selain itu, juga diadakan pengajian akbar dengan dai Ustaz Iskandar, seorang Tionghoa Muslim dari Salatiga, di Masjid Agung Bantul.<sup>92</sup> Jadi perayaan Imlek yang dilaksanakan oleh warga Tionghoa Muslim di Yogyakarta ini sudah berulang kali disandingkan dengan kultur Islam. Inilah yang disebut dengan perayaan “Imlek Gaya Yogya” sebagai usaha untuk melakukan akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya pribumi, dan menjadi salah satu program utama PITI Yogyakarta.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Iman Astri Okta Ayuana, “Organisasi dan Kegiatan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Yogyakarta”, Tugas Akhir pada Program Studi D-3 Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007, hlm. 39

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm.43

<sup>93</sup> Terkait dengan proyek akulturasi yang menjadi agenda PITI Yogyakarta ini, nampak belum mengakomodir budaya lokal Jawa. Padahal yang disebut dengan akulturasi adalah ketika terjadi sintesa antara budaya pendatang dengan budaya asli pribumi. Hal inilah yang disinggung dalam sebuah tulisan di <http://www.pitiyogyakarta.com> (2016). Di situs ini terdapat ualasan menarik: “Gejala akulturasi budaya biasanya muncul dalam suatu masyarakat yang menerima pengaruh dari luar. Misalnya akulturasi budaya Jawa dengan Islam, budaya Bugis-Makassar dengan Islam, budaya Flores dengan agama Katolik, budaya Batak dengan agama Kristen. Tentu menarik jika kita membandingkannya dengan apa yang terjadi pada perayaan

## Mantan pimpinan PITI Yogyakarta, Budi Setyagraha dalam sebuah

“Imlek Gaya Yogya”, sebab di situ tidak terlihat budaya Jawa, padahal konteks sosial-budaya tepat berlangsungnya akulturasi tersebut adalah budaya dan masyarakat Jawa. Hal ini sebenarnya membuka kemungkinan untuk dilakukannya akulturasi yang lebih lanjut, yang melibatkan budaya lokal, budaya Jawa. Jika pembauran sosial dan budaya merupakan salah satu agenda penting dari PITI-DIY, maka PITi sebenarnya dapat memikirkan secara lebih serius langkah-langkah untuk membangun perayaan «Imlek Gaya Yogya» menjadi sebuah arena yang strategis bagi tercapainya pembauran tersebut. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan simbol-simbol budaya Jawa dalam perayaan Imlek tersebut. Simbol-simbol budaya Jawa ini bisa berupa jenis makanan yang disajikan dalam perayaan, misalnya tumpeng. Bisa pula berupa pakaian, misalnya beberapa peserta mengenakan busana Jawa. Selain itu, simbol-simbol Islam yang lain juga dapat lebih ditonjolkan, misalnya penggunaan huruf Arab untuk tulisan «Gong Xi Fa Cai». Bisa juga digunakan huruf Jawa di situ.

Warna merupakan unsur simbolik yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perayaan Imlek, merah merupakan warna yang dominan, sementara dalam Islam warna dominan adalah hijau. Mungkinkah menggunakan warna-warna hijau dan merah untuk hiasan-hiasan atau lampion-lampion dalam perayaan Imlek di masjid? Mungkin akan menarik. Meskipun demikian, ini semua memerlukan pemikiran yang serius, karena jangan sampai terjadi penggunaan simbol-simbol ini ternyata malah mengganggu proses pembauran yang ingin diwujudkan. Bagi Kota Yogyakarta yang sudah majemuk secara sosio-kultural, kehadiran perayaan Imlek gaya PITI Yogyakarta tersebut telah merupakan sebuah aset budaya yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Perayaan ini – jika dikemas dengan lebih rapi, serius dan berskala lebih luas tentu akan dapat menjadi ajang dan media dakwah Islam bagi warga di Yogyakarta, Jawa Tengah, atau bahkan Indonesia, sehingga citra Islam yang negatif di kalangan mereka akan dapat dikikis, dan pandangan kaum Muslim non Tionghoa tentang orang Tionghoa juga akan berubah. Perayaan ini sekaligus juga akan dapat menjadi ajang apresiasi terhadap budaya lain. Bagi yang bukan orang Tionghoa, perayaan ini dapat menjadi arena untuk mengenal seluk-beluk kehidupan orang Tionghoa, sedang bagi orang Tionghoa non Muslim perayaan ini dapat menjadi ajang untuk mengenal budaya Islam, dan mungkin juga budaya masyarakat Yogyakarta. Dengan kata lain, perayaan Imlek ini akan dapat menjadi arena penciptaan sebuah masyarakat yang multikultural, yakni masyarakat yang

penjelasannya mengatakan bahwa selalu ada harapan bagi masyarakat Muslim Tionghoa untuk merayakan Imlek di masjid. Baginya dengan terselenggaranya Imlek setiap tahun memberikan suatu kebanggaan tersendiri bagi dirinya, baik dari sisi tradisi maupun kebebasan sebagai muslim Tionghoa.<sup>94</sup>

Budi menceritakan bagaimana perjalanan panjang yang ditempuh sehingga perayaan ini dapat berjalan dengan lancar. «Banyak tekanan dari berbagai pihak untuk tidak menyelenggarakan acara ini karena mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat yang lain,» ucapnya.<sup>95</sup> Karenanya sebagai warga Tionghoa Muslim, Budi sendiri berharap bahwa masyarakat, utamanya Islam dapat menerima perayaan Imlek ini sebagai bentuk salah satu tradisi yang dirayakan oleh Muslim Tionghoa.

Dari pemaparan di atas bisa diketahui bahwa perjuangan etnik Tionghoa yang dilakukan melalui berbagai cara itu merupakan upaya mereka untuk mengatasi beraagam persoalan etnisitas yang menimpa diri mereka. Akibat terjadinya politik etnik di Indonesia, warga Tionghoa, termasuk yang muslim, merasa didiskriminasikan. Ada sejumlah kebijakan dan regulasi di Indonesia yang masih diskriminatif dan sektarian sehingga membuat hak-hak warga Tionghoa di Indonesia, termasuk warga Muslim Tionghoa di Yogyakarta, belum terpenuhi. Persoalan etnisitas inilah juga yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi PITI Yogyakarta.

Langkah-langkah politik, sosial dan budaya PITI Yogyakarta diorientasikan untuk turut mengatasi berbagai persoalan yang menimpa warga Tionghoa, termasuk persoalan diskriminasi politik berdasarkan ras

---

menaruh perhatian dan memberikan penghargaan pada perbedaan-perbedaan sosio-kultural yang ada dalam dirinya dan dalam masyarakat yang lain.”

<sup>94</sup> Wawancara dengan Budi Setyagraha, pada 2 Desember 2016

<sup>95</sup> *Ibid*

dan etnis tersebut. Melalui politik asimilasi atau pembauran, termasuk yang dilakukan PITI Yogyakarta, warga Tionghoa Yogyakarta termasuk yang terwadahi di dalam PITI, berharap ke depannya tidak ada lagi diskriminasi atau pembedaan antara pribumi dan non-pribumi, melainkan menjadi WNI yang bersifat utuh, sehingga setiap orang atau kelompok yang secara sah sebagai WNI diperlakukan sama di depan hukum dan undang-undang.

### **Kesimpulan**

Peran politik warga Tionghoa di Indonesia, termasuk Tionghoa Muslim di Yogyakarta, sebenarnya sudah lama berlangsung. Namun peran ini mengalami pasang surut sepanjang era perpolitikan di Indonesia. Di sepanjang sejarahnya yang diwarnai pasang surut ini, warga Tionghoa sering menjadi korban politik rasisme dan rasialisme di Indonesia, dari era kolonialisme hingga era sekarang. Hampir setiap era warga Tionghoa mengalami diskriminasi politik akibat politik rasialisme tersebut. Puncaknya adalah di era Orde Baru, di mana warga Tionghoa sangat dibatasi dan dikungkung kebebasan politik dan budayanya. Hingga saat Reformasi, warga Tionghoa baru bisa menikmati kebebasannya kembali, terutama ketika presiden Abdurrahman Wahid, menerbitkan Kepres No 62000/ yang ditandatangani pada 17 Januari 2000 sembari mencabut Inpres No 14 tahun 1967 yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 6 Desember 1967. Inpres yang dikeluarkan Presiden Soeharto tersebut berisi larangan bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan kepercayaan dan tradisi mereka. Inpres tersebut benar-benar membuat etnis Tionghoa tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berbisnis.

Persoalan etnisitas dan rasialisme yang membuat warga Tionghoa mengalami diskriminasi di sepanjang era itu menunjukkan keberadaan



warga Tionghoa sebagai warga negara Indonesia belum sepenuhnya diterima, baik secara politik maupun kultural. Karena itulah, di era Reformasi ini di mana kebebasan berpolitik terbuka, warga Tionghoa, termasuk warga Tionghoa di Yogyakarta, banyak yang masuk ke ranah politik.

Momentum Reformasi inilah yang dimanfaatkan warga Tionghoa Muslim di Yogyakarta yang terwadahi di dalam PITI untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara yang belum terpenuhi. Melalui gerakan politiknya itu mereka ingin diterima sebagai warga negara seutuhnya sehingga tidak mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam bidang apapun; mereka ingin diposisikan sama dengan warga pribumi. Maka PITI Yogyakarta melakukan beragam aktivitas dan pendekatan, melalui politik, budaya dan keagamaan untuk mencapai tujuan besarnya tersebut. Jadi dari persoalan politik Tionghoa Muslim di Yogyakarta ini bisa diketahui bahwa Indonesia hingga kini masih berada di dalam persoalan etnisitas akut yang sewaktu-waktu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara.

### Daftar Pustaka:

- Ayuana, Iman Astri Okta, *Organisasi dan Kegiatan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Yogyakarta*, Tugas Akhir Program Studi D III Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 200
- Coppel, Charles, "Tionghoa Indonesia Dalam Krisis", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Damayanti, Sari Riantika, *Partisipasi Polirik Warga Tionghoa-Indonesia Pada Perodesasi Era Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid*

- (1999-2001): *Studi Atas Surat Kabar Guo Ji Ri Bao*, (Makalah) (akses:15/12/2016)
- Eaton, John W., "Ethnic Group" dalam *Encyclopedia Americana*, Vol.10, New York: Americana Corporation, 1977
- Haryanto, Ahmad Sidik Tri, *Kehidupan Sosial Politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998-2008*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Hasil Muktamar Nasional 3 PITI", Hotel Equator Surabaya, 2-4 Desember 2005
- Khamim, M., Relasi Bisnis Komunitas Muslim Tionghoa dengan Tionghoa Non-Muslim di Kota Yogyakarta: Studi Perspektif Jaringan Sistem Bisnis 'Tionghoa', Skripsi (tidak dibukukan) pada Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Liji, Liang, *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis:2000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia* Jakarta: Kompas, 2012
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i 1985. *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante; Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Maulana, Rezza, *Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta*, dalam Jurnal Kontekstualita, Vol. 26, No. 1, 2011
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Rosda Karya, 2004
- Mujani, Saiful dan R. William Liddle. 2010. *Personalities, Parties and Voters*. Journal of Democracy Volume 21 Number 2 Tahun 2010, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Nyarwi, Ahmad. *Agama, Partai Politik dan Pemilih*. Kajian Bulanan Edisi 10/Februari 2008,. Jakarta: Lingkaran Survei Indonesia, 2008

- Jahja, Junus, “3 Tahun Dakwah di Kalangan Keturunan Tionghoa”, dalam Junus Jahja (ed.), *Zaman Harapan bagi Keturunan Tionghoa*, Jakarta: YUI, 1984
- Jun, Wang Xian, *Orang-Orang China yang mempengaruhi Kemerdekaan Indonesia*, Yogyakarta: PUSTAKA SOLOMON, tth
- Lindsey, Tim dan Helen Pausacker (eds.). 2005. *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*. Singapura: ISEAS.
- Ong, A. Syaukanie, “Tanggapan Untuk Djoko Susilo: Amin Rais, Muhammadiyah dan WNI Keturunan Jawa”, *Pos*, Senin Legi, 2 Maret 1998
- Perdana, Fahmi Rafika, *Integrasi Sosial Muslim Tionghoa: Studi atas Partisipasi PITI DIY dalam Gerakan Pembauran*, (Yogyakarta: Mystico-PITI, 2008
- Setiono, Benny G, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryadinata, Leo, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, terj. Dede Oetomo, Jakarta: Gramedia, 1988
- Syaf, Sofyan, *Politik Etnik---Dinamika Politik Lokal di Kendari*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014
- Thayer, Philip W (ed). 1956. *Nationalism and Progress in Fee Asia*. Baltimore: The John Hopkins Press.
- Trisnanto, A M Adhy *Refleksi Menyambut Muswil PITI Jawa Tengah Quo Vadis Tionghoa Muslim ?*, <http://www.suaramerdeka.com/> (2/03/2005)
- Werdoyo, T.S., *Tan Jin Sing: Dari Kapiten Cina Sampai Bupati Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990
- Jahja, Junus. *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*. Jakarta: YUI, 1984.

### Sumber Online:

<http://www.pitiogyakarta.com> (2016)

<http://piti.or.id/:2008>

<http://pitiogyakarta.com/index.php/profil/tokoh/22-wong-chong-budi-setyagraha> (2016)

**Wawancara:**

Wawancara dengan Willie Sebastian pada 5 Desember 2016

Wawancara dengan Budi Setyagraha, pada 2 Desember 2016

Wawancara dengan Zaelous Siput Lokasari pada 1 Desember 2016

Willie Sebastian dalam wawancara pada 3 Desember 2016

Wawancara dengan Pak Bambang, pada 4 Januari 2013

Wawancara dengan Bapak Ma'ruf Siregar di rumahnya, 11 Desember 2012

Wawancara dengan Ibu Linda Lestari di rumahnya, 4 Januari 2013